



Edy Suparjan

KONFLIK SEGITIGA KEKUASAAN

(Persaingan Sukarno, Angkatan Darat dan PKI
yang melahirkan Prahara 1965)

Editor:

Dr. H. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si.
Taufik, S.H., M.H.

litrus.

Edy Suparjan

KONFLIK SEGITIGA KEKUASAAN

(Persaingan Sukarno, Angkatan Darat dan PKI
yang melahirkan Prahara 1965)

Editor:

Dr. H. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si.

Taufik, S.H., M.H.

 litrus.
Penerbit

KONFLIK SEGITIGA KEKUASAAN
(Persaingan Sukarno, Angkatan Darat dan PKI
yang melahirkan Prahara 1965)

Ditulis oleh :
Edy Suparjan

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, September 2024

Editor:
Dr. H. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si.
Taufik, S.H., M.H.

Perancang sampul: An Nuha Zarkasyi
Penata letak: Noufal Fahriza

ISBN : 978-623-519-207-9
x+ 152 hlm. ; 15,5x23 cm.

©September 2024



PERSEMBAHAN

“Buku ini Spesial saya persembahkan untuk Almarhum Mertua tercinta Bapak Abdurrahman Mansyur, Ama, Pd dan Ibuku Aisyah Musa yang dengan susah payah berjuang demi suksesnya studi Pascasarjana yang saya tempuh. Kado yang paling berharga buat Istri dan Anakku tercinta “Lilis Suryani dan Salman Al’ Farizi” yang tetap sabar dan tabah hidup jauh dari seorang suami dan seorang ayah”. Juga penghormatan yang setinggi-tingginya saya ucapkan untuk Kakakku Bang Iwan Saputra dan adikku Sumarlin Sulaiman yang selalu bersama saya dalam keadaan suka maupun duka”.



PENGANTAR

Buku ini terinspirasi ketika Penulis membaca Buku karangan Victor M Fic yang berjudul “Kudeta 1 Oktober. Dan setiap penulis berangkat kuliah selalu membawanya, suatu ketika buku tersebut di lihat oleh Dr. Abdul Syukur selaku pembimbing Tesis penulis, beliau berkata, “Kenapa kamu tidak mengangkat judul tentang G 30 S, karena itu masih dalam kontroversi katanya, lalu penulis pun merubah judul Tesis dengan “Peristiwa G 30 S sebagai Isu Kontroversial pada mata pelajaran Sejarah”. dari Tesis inilah sumber referensi awal penulis untuk melanjutkan pembuatan Buku sebagaimana yang di baca oleh anda sekarang ini.

Selain itu, latar belakang saya menulis buku yang berjudul “Peristiwa 1965 Antara Rekayasa dan Konspirasi” ini, karena saya melihat begitu langka nya buku-buku sejarah yang beredar di Kota maupun Kabupaten Bima yang membahas secara khusus mengenai G 30 S. mengapa penulis mengangkat judul tersebut, alasannya penulis melihat secara umum bahwa Peristiwa 65 adalah merupakan rekayasa-rekayasa pihak asing yang tidak terlihat dan tidak terbaca, misalnya isu Dewan Jenderal dengan keberadaan dokumen Ghilchrist yang belakangan hari ternyata hasil rekayasa intelejen dari Ceko, Ladislav Battman. Begitu juga dengan konspirasi PKI dengan Biro Khusus dalam menculik para Jenderal. kemudian pada edisi Revisi Buku ini saya ubah menjadi " KONFLIK SEGITIGA KEKUASAAN; Persaingan Sukarno, Angkatan Darat dan PKI yang melahirkan Prahara 1965. Untuk itu, Buku ini menawarkan paradigma baru dalam melihat Peristiwa 1965. karena bagaimanapun juga kondisi

politik saat itu, memang sedang terjadi Persaingan antara segitiga kekuasaan. kemudian banyak kepentingan asing yang mewarnainya.

Buku ini sangat penting dibaca baik oleh mahasiswa, pelajar maupun masyarakat pada umumnya, karena G 30 S merupakan peristiwa yang rumit untuk dikaji, mungkin dengan terbitnya buku ini, akan mempermudah mahasiswa dan pelajar untuk memahami peristiwa G 30 S secara rinci. Lebih-lebih buku ini, mungkin bisa dijadikan referensi tambahan bagi guru sejarah.

Pada kesempatan ini, saya sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Guru Besar kami, Prof. Dr. Tuti Nuriah, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah. Prof. Dr. Asmaniar Z, Idris, M.Pd, yang tidak saja Guru Besar, serta pembimbing saya namun yang saya anggap sebagai Ibu yang melahirkan saya. Prof. Dr. Diana Nomida Munsir, M.Pd. seorang Guru Besar yang tegas dan peduli terhadap kemajuan Pendidikan sejarah ke depannya. Dr. Anhar Gonggong, sang Guru Besar yang menjelaskan sejarah dengan singkat, padat dan jelas yang menurut saya ketika otak tersumbat dengan pikiran ilegal, ketika mendengar kuliah Pak Anhar, otak kami bagaikan di siram air es. Kepada Dr. Umasih, M. Hum, Dr. Abdul Syukur, M. Hum, yang sangat peduli terhadap perkembangan akademik saya, terima kasih yang tak terhingga atas motivasi sehingga saya memberanikan diri menulis buku ini. Dr. Nurzengky Ibrahim, MM, yang kami sudah anggap sebagai seorang ayah, yang selalu dan selalu berdiskusi dengan saya, agar saya mempercepat penulisan buku ini. Dr. Murni Winarsih, M.Pd yang telah membimbing dan membina kami dengan kasih sayang serta penuh dengan metode ilmiah namun tetap dalam ikatan kebersamaan.

Juga, kepada teman-teman sekelas, Wage Wardana terima kasih karena telah meminjamkan saya buku Katastrofi mendunia karangan Taufik Ismail yang sampai sekarang belum saya kembalikan, Ibu Fitri terima kasih juga atas bukunya yang berjudul "Sebelum G 30 S Sesudah karya Nina Herlina Lubis yang saya bawa lari sampai sekarang. Untuk Sofian Barakati yang telah memberikan saya buku Madiun Affairs dan

buku orang-orang di balik tragedi 65, terima kasih yang tak terhingga buatmu saudaraku. Tidak lupa untuk Nur Indah Lestari yang selalu memberikan informasi penting seputar akademik dan yang selalu membantu saya di kala susah, Bu Rena, Selfisina Kailuhu, Saiful Bahri, Zia Ulhaq dan Fahmi. Teman-teman diskusi saya yang sangat progresif. Buat Abubakar Pela teman senasib dan seperjuangan yang ikut membantu saya untuk meminjam referensi mengenai G 30 S di perpustakaan dan yang sekaligus mengantar saya saat Wisuda. Bagi saya Pak Abu adalah Pahlawan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Suharmajid, S.Pd yang telah meminjamkan saya buku Bung Hatta, “Untuk Negeriku”.

Bima, Februari 2017

EDY SUPARJAN

Motto

*“Perjuangan Manusia Melawan Kekuasaan adalah Perjuangan
Ingatan Melawan Lupa”*

(Milan Kundera)

*“Semua Orang Suci Punya Masa Lalu dan Semua Pendosa Punya
Masa Depan “*

*“Yang perlu dikhawatirkan adalah yang berdebat takut dengan
Komunisme sama-sama tidak tahu Komunisme”*

Ada beberapa tanda agar kita mengetahui apakah orang tersebut mengetahui Komunisme yaitu:

1. Kalau dia membaca buku Komunisme maka dia akan paham tentang Komunisme
2. Kalau dia sangat paham Komunisme maka dia akan sangat anti-Komunisme



DAFTAR ISI

Persembahan.....	iii
Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix

MEMAHAMI SEJARAH SEBAGAI BENTUK KESADARAN1

BAB I.

MENGURAI LATAR BELAKANG PEMBERONTAKAN KOMUNIS DI INDONESIA..... 5

- A. Kebangkitan Awal
Komunisme..... 5
- B. Kondisi Politik Tahun
1960-an..... 18
- C. Detik-Detik Sebelum
Peristiwa G 30 S..... 28
- D. Kronologis G 30 S..... 34

BAB II.

G 30 S DALAM RAGAM VERSI.....47

- A. G 30 S Skenario PKI 47
- B. Konflik Internal
Angkatan Darat 54
- C. Soekarno, Nasakom
dan G 30 S 57
- D. Keterkaitan Soeharto
dengan Pelaku G 30 S.. 70
- E. Asing, (CIA) dan
Rekayasa Peristiwa G
30 S 80
- F. Tradisi Penculikan dan
Tradisi Daulat 88

BAB III.

BEBERAPA PROFIL PELAKU DAN SAKSI G 30 S.....91

- A. Syam Sang Misterius,
Bukan Agen CIA 91
- B. Kesaksian Bambang
Widjanarko yang
Diragukan 93
- C. Pranoto Sang Jenderal
Sederhana..... 96
- D. Pergolakan Daerah
dan Dampak G 30 S..... 98



- E. Reaksi Mahasiswa
Menentang G 30 S..... 104
- F. Supersemar yang
Dipertentangkan 110
- G. Eksplanasi G 30 S
dalam Kurikulum..... 115
- H. Haruskah Pemerintah
Meminta Maaf pada
Korban
G 30 S 1965 121
- I. Sebuah Renungan 126

Daftar Pustaka 131
Lampiran-Lampiran 137



MEMAHAMI SEJARAH SEBAGAI BENTUK KESADARAN

(Sebuah Pengantar)

Pengertian Sejarah secara positif adalah sejarah merupakan ilmu tentang manusia, Sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial, Sejarah adalah ilmu tentang sesuatu tertentu, satu-satunya dan terperinci. Menurut Kuntowijoyo, Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Sejarah diibaratkan batang korek api, tergantung orang yang menyusunnya, entahkah itu disusun atau dibuat seperti rumah-rumahan, orang-orangan maupun kedalam bentuk segi tiga dan segi empat.¹ Jadi fakta sejarah, merupakan sesuatu yang masih berserakan, Sejarahwan lah yang memiliki tanggungjawab untuk menyusunnya dengan sangat indah sehingga yang membacanya akan takjub dan selalu ingin mengetahui hal tersebut secara mendalam.

Dalam sejarah, masa lampau manusia bukan untuk masa lampau itu sendiri dan dilupakan begitu saja. Sejarah merupakan keterhubungan dari apa yang terjadi di masa lampau dengan gambaran di masa sekarang dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sejarah merupakan modal bertindak di masa kini dan menjadi acuan untuk perencanaan di masa mendatang.² Apa yang dimaksud oleh Dien Madjid diatas adalah bagaimana

¹ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013, h. 14

² M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi. *Ilmu Sejarah Sebuah pengantar*. Jakarta: Kencana. 2014, h. 8

kita menghayati sejarah sebagai suatu hal yang sangat penting, dalam proses kehidupan memahami sejarah agar tidak mengulangi kesalahan yang berulang-ulang.

Sejarah adalah topik ilmu pengetahuan yang sangat menarik tidak hanya itu, sejarah juga mengajarkan hal-hal yang sangat penting, terutama keberhasilan dan kegagalan para pemimpin, sistem perekonomian yang pernah ada.³ Baik Dien Madjid maupun Sulasman secara substansi memiliki kesamaan dalam melihat fungsi dan manfaat dari belajar sejarah agar manusia tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, dan mengambil hikmah dari setiap kesuksesan peradaban masa lalu.

Menurut Penulis sendiri Sejarah adalah siklus yang berulang dari generasi ke generasi, perbedaannya hanya perubahan manusia, ruang dan waktu dimana peristiwa tersebut terjadi. Apa yang dialami generasi terdahulu akan dialami juga oleh generasi sekarang, misalnya, Revolusi, konflik, perubahan-perubahan sosial lainnya. Memahami sejarah agar bagaimana kita sebagai generasi tidak mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya, bukankah sejarah adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga.

Mempelajari sejarah sangat relevan dengan kondisi sekarang ini, dimana kita kesulitan sekali dalam memilih figur untuk dijadikan teladan yang baik, dengan mengidentifikasi diri dengan karakter beberapa tokoh Pahlawan Nasional, mungkin sedikit akan memberikan solusi untuk membangun *nation and character Building* dengan harapan manusia tidak meneruskan kebiasaan buruk yang terjadi saat ini.

Ancaman disintegrasi bangsa merupakan kebijakan prioritas Kabinet Indonesia Hebat sekarang, kedaulatan negara dalam ancaman besar, Dominasi Amerika dan Tiongkok diwilayah sengketa konflik laut china selatan adalah merupakan ancaman ketimbang peluang bagi Indonesia, hal ini harus kita waspadai dengan isu yang

³ Sulasman. *Metodologi penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka setia. 2014, h. 22.

berbarengan dengan itu, misal maraknya kasus masuknya warga asing ilegal seperti orang China. sekitar ribuan orang masuk lewat arah utara Irian Jaya, pertanyaannya ada apa? Tentu ada maksud dan tujuan lain dengan kehadiran mereka di Indonesia.

Masalah demi masalah kian marak mewarnai disegala aspek kehidupan, maraknya korupsi, meningkatnya kekerasan dalam sekolah, ini membuktikan diantara kita masih banyak yang kehilangan kejujuran, hilangnya rasa kebangsaan, hilangnya saling menghargai perbedaan, hilangnya tata krama dan tanggungjawab sosial. Menurut penulis sendiri, salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsa dewasa ini adalah memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat dengan pembinaan jati diri bangsa lewat tiga mata pelajaran yaitu, Pelajaran Agama, Sejarah dan Pendidikan Kewargaan. Namun sangat ironis pula, tidak sedikit diantara warga Indonesia saat ini kurang peduli dengan produk sejarah dan kurang menghargai sejarah bangsanya, indikatornya banyak generasi yang tidak berminat pada pelajaran sejarah, ketika ditanya nama salah satu tokoh dari Panitia sembilan yang merancang Piagam Jakarta, peserta didik akan diam, begitu rendahnya kesadaran kita terhadap sejarah para pendiri bangsa. Generasi kita, lebih suka menghafal nama-nama artis beken yang menjadi idola mereka, ketimbang menghafal biografi tokoh pendiri bangsa.

Lunturnya roh Nasionalisme dalam jiwa kita sebagai generasi penerus bangsa, akan menciptakan Bom waktu yang suatu saat akan meledak dan memporak-porandakan sendi-sendi kebangsaan dan meruntuhkan NKRI yang kokoh dan perkasa ini. Ancaman eksternal telah hadir depan mata, ancaman internal sedang menyusun kekuatan dibawah tanah dengan melakukan penetrasi dan infiltrasi kedalam lembaga-lembaga atau Ormas-ormas anti-Pancasila.

Untuk itulah, penulis sangat berkepentingan dalam menulis buku ini, dengan melihat bahwa kita sedang mengalami musim kering moralitas, gampang diadu domba, gampang di hasut. Bagi penulis merefleksi kembali *Peristiwa Tahun 1965* bukan berarti mundur

kebelakang, namun pada dasarnya kita menoleh sejenak kebelakang, tentang kegagalan kita menata sistem ekonomi-politik masa lampau, sehingga di masa sekarang kita tidak mengulangi kegagalan dan kesalahan-kesalahan tersebut. Refleksi, menoleh kebelakang ibarat sang sopir melihat kaca spion, agar bisa mengambil haluan kiri ataupun kanan. Sehingga dia bisa melewati jalan yang berliku dan bercabang-cabang.



MENGURAI LATAR BELAKANG PEMBERONTAKAN KOMUNIS DI INDONESIA

A. Kebangkitan Awal Komunisme

Faham komunisme dibawa oleh Komunis Belanda Sneevilt, Bergma, Branstedder dan H. W. Dekker. Mengawali penyebaran ajarannya dengan membentuk *Indische sociaal democratische Vereniging (ISDV)* atau Perserikatan Sosial Demokrat Hindia. Bulan Juli 1914. Menyebut dirinya sebagai sosial demokrat. Salah satu tokoh tergarap dengan baik adalah Semaun.

Pada Tahun 1926-1927 terjadi pemberontakan di Sumatera Barat dan Banten, walau kebanyakan buku sejarah mengatakan pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, Namun Sejarahwan G. Moedjanto dalam bukunya yang berjudul



“dari pembentukan *Pax Neerlandica* sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, menolak dikatakan bahwa pemberontakan pada Tahun 1926-1927 adalah pemberontakan rakyat yang sengaja di eksploitir oleh PKI, karena pada saat itu PKI memberikan janji-janji seperti, janji yang diberikan kepada orang Minangkabau agar mengembalikan Kerajaan Pagaruyung, dan kepada orang-orang Banten yang taat beragama agar setelah pemberontakan mereka dapat leluasa naik Haji. Sekalipun pemberontakan ini adalah merupakan inisiatif PKI, namun Tan Malaka sendiri menolak pemberontakan tersebut, dengan alasan situasi dan kondisi Revolusioner belum masak.⁴ Dari sini lah awal pertentangan Tan Malaka yang memiliki persamaan dengan garis politik Trotsky dengan teman-teman PKI lain yang mengikuti garis Stalinis. Sehingga pasca Kemerdekaan Indonesia garis permusuhan tersebut tetap dilanjutkan. Dengan orang-orang Murba sebagai perwakilan Trotsky dan PKI sebagai perwakilan yang mengikuti garis Stalin.

Selain Tan Malaka yang tidak setuju terkait pemberontakan PKI Tahun 1926-1927. Ternyata, menurut pengakuan Semaun yang datang dari Moskow ke Den Haag menemui Bung Hatta untuk membicarakan masalah pemberontakan dan reaksi Belanda setelahnya. Menurut Semaun pada dasarnya Stalin tidak setuju atas pemberontakan tersebut, bahkan Stalin membentak Alimin dan Muso yang diutus ke Moskow, Stalin dengan nada marah mengatakan, “Kamu orang gila, pulang lekas ke Indonesia, batalkan rencana pemberontakan itu”. Namun, apa mau dikata nasi sudah menjadi bubur, ketika Alimin dan Muso tiba di Singapura, pemberontakan sudah dilakukan.⁵

Akibat kegagalan pemberontakan PKI tersebut, timbul inisiatif Semaun dan Hatta untuk melakukan Konvensi yang disebut Konvensi Semaun-Hatta. Adapun bunyi konvensi tersebut pada dasarnya sebagai berikut:

⁴ G. Moedjanto. *Dari pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 2003, hh. 131-135.

⁵ Mohammad Hatta, *Bukittinggi-Rotterdam lewat Betawi, Untuk Negeriku sebuah otobiografi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2011), h. 268.

- Perhimpunan Indonesia yang akan berkembang menjadi partai rakyat, harus berjanji akan bekerja dalam bidang sosial politik untuk kepentingan rakyat
- PKI mesti mengakui kepemimpinan Perhimpunan Indonesia dan tidak akan melakukan oposisi selama Perhimpunan Indonesia konsekuen dalam perjuangannya
- Percetakan PKI harus diserahkan kepada Perhimpunan Indonesia dan Perhimpunan Indonesia berjanji akan mengorganisir Pers Nasional
- Konvensi dibuat dalam enam lembar dengan masing-masing memegang tiga lembar.⁶ Namun, sayangnya hanya satu orang yang mengetahui konvensi tersebut yaitu Abdul Madjid Djodjoningrat, sahabat akrab Bung Hatta sesama pendidikan di Belanda.

Pasca kemerdekaan Indonesia, banyak Partai politik yang bermunculan begitu juga dengan organisasi-organisasi pemuda dan laskar-laskar rakyat. Untuk pertama kalinya Kabinet Sjahrir mengalami goncangan politik karena terlanjur menyepakati persetujuan Linggarjati, walau pada awalnya, keputusan Sjahrir merupakan kesepakatan dengan para pendukungnya sesama sosialis. Namun ujung-ujungnya Sjahrir juga mundur dari Kabinet karena dianggap tidak mampu menjalankan roda pemerintahan. Walaupun sebelum konsensi Sjahrir berkonsultasi dengan para sahabatnya seperti, A.K. Gani (PNI), Natsir (Masyumi), dan Abdul Majid (PS), dan Amir Syarifuddin. Namun apa mau dikata sesama partainya pun tidak menyokong Sjahrir. Setelah Sjahrir kini giliran Amir Syarifuddin yang memimpin Kabinet setelah dilantik pada 3 Juli 1947. Mayoritas Kabinet Amir adalah merupakan orang-orang kiri yang terwakilkan diantaranya, Setiadjudi, Mr. Abdul Madjid, Mr. Tamzil, SK. Trimurti sebagai Menteri Perburuhan dan Maruto Darusman sebagai Menteri Negara. Sementara pertempuran terus terjadi sebagai akibat dari

⁶ Mohammad Hatta, *Ibid.*, hh. 270-271.

Agresi Militer Belanda I, RI kehilangan daerah-daerah terbaik dan menerima 700.000 pengungsi. Kemudian dari sini PBB melakukan intervensi dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Pada tanggal 7 November 1947, perundingan resmi dibuka di atas Renville. 23 Januari 1948 Amir meletakkan Jabatannya karena dari awal Masyumi sudah tidak mendukung atas kebijakannya, ternyata apa yang dialami oleh Sjahrir kembali di alami oleh Amir sebagai efek dari penghianatan teman-teman sesama kiri, yaitu baik Sjahrir maupun Amir sama-sama di tusuk dari belakang oleh kelompoknya sendiri.

Perjanjian Renville membawa efek paling berat bagi masyarakat Indonesia dan Pemerintah Republik itu sendiri, ketika Pasukan Siliwangi melakukan Hijrah ke daerah pedalaman Jawa banyak kalangan tentara dari pasukan Siliwangi mengalami stres, karena tidak rela meninggalkan sanak keluarganya di Jawa Barat, begitu juga dengan mereka yang di tinggalkan merasa dianak tirikan oleh Pemerintah Indonesia. sehingga membawa efek dan permulaan bagi Pemberontakan DI/ TII Jawa Barat yang di pimpin oleh Sekarmajid Maridjan Kartosuwiryo tahun 1949-1961.

Pada 3 Februari Hatta dilantik menjadi Kabinet dan meneruskan program Persetujuan Renville, Program yang paling membawa efek buruk bagi TNI Masyarakat akibat adanya Program Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) dari Kabinet Hatta, hal ini bagi FDR sangat menyakitkan hati karena di dalam TNI Masyarakat banyak pendukung FDR. TNI Masyarakat merupakan kelanjutan Biro Perjuangan yang didominasi oleh Jenderal Mayor Djoko Sudjono dan Jenderal Mayor Ir. Sakirman, pengaruh FDR juga amat kuat di Divisi IV Senopati yang jumlah pasukannya kira-kira 5.000 orang dan panglimanya adalah Mayor Jenderal Sutarto. Mayor Jenderal Sutarto adalah teman dekatnya Alimin di masa sebelum Kemerdekaan.

Awal Juni 1948 Mayjen Sutarto membentuk formasi perlawanan yang dinamakan Pertempuran Panembahan Senopati (PPS) dengan kekuatan 5 Brigade 16 Bataliyon, masing-masing Brigade dengan pimpinan yaitu, Brigade V Letkol Suadi, Brigade VI Letkol S. Sudiarto,

Brigade VII Letkol A. Yadau, Brigade VIII Letkol Suyoto dan Brigade IX Letkol Hollan Iskandar.⁷

Program Reorganisasi dan Rasionalisasi (*Re-Ra*) yang dijalankan oleh Kabinet mengakibatkan terjadinya resistensi kuat dari Divisi Senopati yang merasa terusik akibat penyempitan batas-batas teritorial dan dengan penempatan pasukan Siliwangi. Selain itu, muncul sentimen kultural antara Senopati dan Siliwangi, karena sebagian besar pasukan Senopati adalah orang Jawa Tulen sementara Siliwangi kebanyakan orang Sunda, kemudian sebagian besar pasukan Senopati adalah para mantan anggota PETA yang populis dan radikal, berkat kerasnya didikan Jepang, sementara pasukan Siliwangi adalah pasukan yang arogan, elitis, otoritarian, kelas atas dan kosmopolitan. Secara psikologis pasukan Senopati menganggap Siliwangi adalah orang asing yang mengganggu ketentraman mereka. Apalagi pasukan Siliwangi kebanyakan orang Sunda yang dibentuk oleh Belanda. Untuk itulah secara kultural antara Siliwangi dan Senopati tidak dapat bersatu dan bekerjasama.

Pada dasarnya Panglima Jenderal Sudirman mendukung kelompok oposisi di Solo, hal ini karena akumulasi kekuasaan pemerintah di Yogyakarta dan juga karena pemerintahan menahan kelompok Persatuan Perjuangan dibawah kepemimpinan Tan Malaka.

Keadaan tidak seperti yang diharapkan oleh Kabinet Hatta Suhu politik semakin mendidih dengan tertembaknya Panglima PPS Mayjen Sutarto, pada tanggal 2 Juli 1948. Hal ini berdampak pada *clash* terbuka antar kedua pasukan. Misteri meninggalnya Mayjen Sutarto menimbulkan berbagai isu dan pandangan dari berbagai tokoh, ada yang mengatakan bahwa tertembaknya Sutarto merupakan rekayasa dan strategi pemerintah untuk memaksa pasukan Senopati agar menerima rencana *Reorganisasi-Rasionalisasi* Militer. Jenderal Sudirman mengatakan, bahwa Sutarto ditembak oleh anak buahnya sendiri atau mungkin kelompok FDR dengan maksud menimbulkan

⁷ David Charles Anderson, *Kudeta Madiun 1948*, (Yogyakarta: MedPress, 2008), hh. 25-26.

kekacauan di Solo. Sementara pihak FDR menuding Barisan Banteng dibalik pembunuhan Mayor Soetarto.⁸ Hingga 1 September 1948 terjadi lagi penculikan terhadap dua orang anggota FDR/PKI Slamet Widjojo dan Pardiyo, kedua orang ini disekap di markas tentara di Tasikmadu-Surakarta. Politik adu domba terjadi di Surakarta yang menyebabkan konflik terbuka antara Pasukan Siliwangi dan Pasukan Senopati bersama pemuda Pesindo. Pada 13 September giliran Dr. Muwardi selaku pimpinan Barisan Banteng yang di culik oleh pihak-pihak dari Pesindo.⁹ Hingga tanggal 16 September 1948 pertikaian bersenjata terus berlangsung. Penculikan-penculikan yang terjadi merupakan jalan dalam rangka untuk melakukan pertempuran terbuka antara kedua belah pihak. Sehingga pertempuran di Solo atau Surakarta merupakan pembukaan bagi pertempuran selanjutnya di Madiun.

Di samping kelaskaran FDR, memiliki banyak pengikut di kalangan petani dan buruh pada saat itu anggota SOBSI kira-kira 200-300 orang. Pada 23 Juni mereka melakukan pemogokan di Pabrik Karung dan 7 Pabrik Kapas.

Setelah kembalinya Suripno dengan Sekretarisnya Soeparto yang ternyata Muso pada Tanggal 11 Agustus 1948. Keduanya membangun kekuatan lebih lama dibawah bendera Front Demokrasi Rakyat (FDR), di berbagai daerah Suripno dan Muso memberikan ceramah serta berpidato dihadapan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI). Suripno dengan nada memuji-muji Rusia.¹⁰ Muso yang merupakan seniornya Bung Karno waktu semasa menjadi muridnya H.O.S Cokroaminoto. Pada Tanggal 13 Agustus Muso dan Soeripno bertemu Presiden Soekarno, suasana haru disertai air mata berlinang keduanya saling berpelukan, bung Karno menyapa, “*Lho Kok, semakin awet muda saja, Bung*”. Muso menjawab, “ia tentu saja,

⁸ David Charles Anderson, *Ibid.*, h. 32.

⁹ Suara Islam. *Pemberontakan PKI Meletus di Madiun, di Mulai dari Kekacauan di Surakarta*. Edisi. 207 Tanggal 16-30 Oktober 2015., hh. 18-19.

¹⁰ Soe Hok Gie. *Orang-orang di Persimpangan kiri jalan*. (Yogyakarta: Bentang Ilmu. 2005), h. 215.

inikan semangat Moskow, semangat Moskow selamanya muda”. Cerita demi cerita, Bung Karno mengatakan, bahwa, Muso kalo berpidato lengan Baju di nyencing dan iya adalah seorang yang sering berkelahi.

Semenjak kedatangan Muso, bagi PKI ibarat Juru Selamat, bagi perkembangan politik selanjutnya. Menurut Muso, PKI sudah banyak menyimpang dan jauh dari rakyat, untuk itu kedatangannya dalam rangka menyatukan seluruh elemen Partai dan Massa dibawah satu naungan yang ia beri nama Front Nasional. Namun hal tersebut, tidak semulus apa yang dipikirkan oleh Muso, ditengah pergulatan ideologi, politik kepentingan justru Masyumi menolak untuk bergabung dan mendesak Kabinet Hatta agar menggunakan tangan besinya dalam menumpas bagi setiap kelompok pengacau saat itu.

Tidak bisa di pungkiri bahwa kekacauan-kekacauan yang terjadi di Solo merupakan strategi PKI agar meruntuhkan Pemerintah Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, bersamaan dengan peristiwa Solo diam-diam PKI/FDR mempersiapkan kekuatan pasukan utamanya di Madiun. Dan banyak dari pimpinan pasukan seperti Letkol Yadau, Letkol Suyoto dan juga Letkol Dachlan di pecat dari jabatannya akibat keterlibatan langsung mereka pada peristiwa Solo.¹¹

Ketika FDR sedang matang dalam rencananya, tiba-tiba kelompok Gerakan Revolusi Rakyat berbicara dalam rapat umum yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 5 September 1948, Rustam Effendy berbicara tentang rahasia-rahasia Setiadjud dan Maruto Darusman (pendiri Marx House) yang memiliki keterkaitan dengan gerakan bawah tanah atau yang memiliki hubungan dengan persoalan Uni Indonesia-Belanda. Setelah diketahui lima serangkai merupakan utusan Partai Sosialis Belanda, diantaranya adalah Abdul Madjid, Setiadjud, Tamzil, Moewaladi, dan Maruto Darusman. Dan hal tersebut diakui oleh Amir dan Setiadjud bahwa mereka adalah kelompok bawah tanah yang mengimbangi kekuatan radikal di Indonesia. Setelah diketahui bahwa Amir pernah menerima uang dari Van Der Plass sebanyak 25.000 golden untuk membentuk dan

¹¹ David Charles Anderson, *Op. Cit.*, h. 70.

menyusun gerakan bawah tanah.¹² Sikap beberapa tokoh diatas merupakan cerminan tidak konsistennya para tokoh bangsa pada saat itu, mereka banyak yang mengkhianati perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan cara-cara bekerjasama dengan pihak Belanda dan mengkhianati bangsa Indonesia pada umumnya.

Komunis melakukan aksi makar pada tanggal 18 September 1948 dibawah pimpinan Muso bergerak dengan membawa restu dari Stalin. Dengan nada menghasut Muso melakukan Prapoganda mengobarkan emosi rakyat di depan corong radio Madiun tanggal 19 September 1948, Muso berkata:

*“...yang memerintah telah memakai revolusi kita sebagai kuda-kudaan untuk menguntungkan diri. Mereka sewaktu pendudukan Jepang telah menjadi quisling budak-budak Jepang, tukang jual romusha, dan propagandis-propagandis Heiho. Lebih dari 2 juta Wanita Indonesia telah menjadi Janda, lantaran laki-lakinya menjadi romusha. Sekarang mereka akan menjual Indonesia dan rakyatnya sekali pada imperialis Amerika...”*¹³

Pidato Muso tersebut juga mendapat respon dari Presiden Soekarno dengan menyatakan, *“...bagimu adalah pilihan dua: Ikut Muso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta, yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin negara Republik Indonesia yang merdeka, tidak di jajah oleh negeri apapun juga...”*¹⁴

Pemberontakan yang dipimpin oleh Muso dengan pimpinan militer Djoko Sudjono tidak berjalan lama, Kota Madiun dapat dibebaskan pada tanggal 30 September 1948 tanpa mendapat perlawanan yang berarti dari pihak pemberontak. Satu persatu para pemberontak dicituk dan ditangkap, Muso ditangkap dan Mayatnya dibawa ke Ponorogo, di pertontonkan lalu dibakar. Kemudian Residen Madiun di tangkap 4 November di Girimarto, lalu menyusul

¹² Soe Hok Gie, *Op. Cit.*, h. 230.

¹³ *Ibid.*, h. 247- 248

¹⁴ Taufik Ismail. *Katastrofi Mendunia Marxisma Leninisma Stalinisma Maosima Narkoba*. Jakarta: Yayasan Titik Infinitum. 2005., h. 201.

Residen Pati, dr. Wioreno yang terkenal dengan kebaikannya membantu rakyat kecil sampai-sampai pada saat regu tembak ingin mengeksekusi menyembah dan meminta ampun dulu kepada dr. Wioreno. Pada 28 November Kolonel Djoko Sudjono bersama Maruto Darusman, Sajogo dan kawan-kawan lainnya ditangkap oleh kesatuan TNI di Desa Peringan, dekat Purwodadi. Amir kemudian menyerah pada pasukan Pimpinan Kemal Idris. Kemudian diadili oleh Jaksa Agung lalu dibawa ke Solo dan diperiksa oleh Gubernur Militer Gatot Soebroto.¹⁵

Ketika beberapa pemimpin senior Republik ditawan oleh Belanda di Yogyakarta tanggal 27 Desember 1948, kelompok Komunis Nasional memproklamasikan Pemerintah Republik yang baru dengan Tan Malaka sebagai Presidennya. Para pemimpin Narotama menentang keras usaha tersebut, Surachman menangkap Tan Malaka dan kawan-kawannya, namun berhasil lolos, menurut versi lain Tan Malaka tertangkap di sebelah selatan Nganjuk, dan tertembak oleh Yonosewoyo mantan Divisi VII TKR Surabaya dan versi lain Tan Malaka di eksekusi atas perintah Sungkono dan Surachmat awal bulan April 1949 di bagian selatan Keresidenan Kediri.¹⁶

Menurut David dalam buku Kudeta Madiun 1948 bahwa, para pemimpin kaum kiri yang terbunuh dalam pertempuran Madiun diantaranya; Setiadjudi mantan ketua PBI, Mayor Sudigdo Danyon pada Brigade ke-5 PPS yang terbunuh di Pacitan sekitar tanggal 20 Oktober ketika berusaha menghindari gerak maju pasukan Siliwangi, Muso sendiri dieksekusi di Ponorogo sekitar tanggal 31 Oktober. Kemudian mereka yang terbunuh beberapa saat setelah tertangkap diantaranya adalah Letkol Sidik Arselan merupakan komandan Resimen kesatuan Pesindo pada Brigade ke-29, Letkol Munaji Danyon TLRI di Nganjuk keduanya tertangkap awal Oktober oleh CPM Kediri dari Bataliyon yang dipimpin oleh Sabaruddin, Abdul Muntalip Residen Front Nasional di Madiun diadili secara Darurat,

¹⁵ Sok Hok Gie, *Op. Cit.*, h. 267- 270.

¹⁶ David Charles Anderson, *Op. Cit.*, h. 89.

S. Karno Residen Semarang yang ditangkap pada tanggal 26 Oktober lalu dieksekusi 10 November 1948 dekat Purwodadi. Sementara itu dikalangan pemimpin senior FDR/PKI yang dieksekusi pada tanggal 19 Desember 1948 malam adalah Maruto Darusman anggota sekretariat Jenderal Politbiro PKI, Joko Sujono Gubernur Militer Front Nasional di Madiun dan terakhir Amir Syarifudin dan Suripno.¹⁷

Pemberontakan PKI Madiun dibawah kampanye Muso dan Amir Syarifuddin, membawa dampak yang amat luas bagi keberlangsungan politik partai, namun hal ini tidak membuat D.N Aidit dan Lukman putus asa dalam membesarkan nama Partai PKI, terbukti pada pemilu Tahun 1955, Partai PKI mendapatkan urutan ke empat besar dengan jumlah suara. 6. 179.914 atau 16,36% dengan jumlah kursi 39 kursi untuk DPR. Sementara untuk anggota Konstituante PKI mendapatkan suara 6. 232.512 atau 16,47% dengan jumlah kursi 80 kursi. Dengan kemenangan ini pengaruh PKI semakin besar di kalangan masyarakat terlebih di Daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Teori perjuangan kelas yang diusung oleh komunisme, menghantarkan PKI di tahun 1957- 1965 menjadi kekuatan besar yang menjadi kekhawatiran tersendiri dikalangan non-komunis di kala itu. Di daerah-daerah seperti Jombang dan Kediri, gelora jihad pertentangan terhadap komunisme dianggap PKI sebagai bentuk pemicu konflik. Sementara dikalangan Islam, hal itu terpicu oleh ulah PKI yang mengambil alih tanah-tanah para Kiyai mengatasnamakan rakyat, sebagai bentuk dari implementasi *Land Form*. pertentangan antara BTI dengan umat Islam berlangsung panjang. Bahkan bergolak diberbagai daerah seperti Jombang, Kediri dan Solo.¹⁸

Aksi-aksi PKI telah menimbulkan kesulitan ekonomi dan konflik sosial politik pada waktu itu, sejak PKI mengambil alih perusahaan di tangan Belanda, PKI semakin agresif dalam berpolitik. Sementara Di kalangan Seniman muncul tindakan yang kurang berbudaya yang dilakukan oleh seniman kiri terhadap kelompok Manifestasi

¹⁷ David Charles Anderson, *Ibid*, h. 115-116

¹⁸ Syafi'i Ma'arif, et.al, *Menggugat Sejarah*, (Bandung: Segarsy, 2010), h. 28.

Kebudayaan (Manikebu) Taufik Ismail. Usulan pelarangan HMI yang sangat tidak demokratis, belum lagi peristiwa Kanigoro di Jawa Timur yang menimpa PII. Semuanya merupakan rencana-rencana yang matang dalam rangka untuk membuat suasana semakin krisis dan bangsa Indonesia mengalami kegoncangan ekonomi politik.¹⁹

Partai Komunis Indonesia adalah partai politik pertama yang didirikan pasca kemerdekaan tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1945. Dan yang memiliki inisiatif pendirian partai ini datang dari Mr. Yusuf. Saat itu Aidit masih aktif lewat organisasi pemuda dan buruh di Jakarta. Sementara Lukman mengorganisir peristiwa tiga daerah.²⁰ sementara partai lain seperti Masyumi didirikan ketika Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945 dengan Sukiman Wirdjosandjojo sebagai ketua, setelah Masyumi menyusul PNI sebagai Partai ketiga yang didirikan pada tanggal 29 Januari 1946 di bawah pimpinan Sarmidi Mangunsaskoro. Ketiga partai ini merupakan partai besar pada jaman orde lama.

Tahun 1952 merupakan tahun kebangkitan kembali PKI setelah terjadi pemberontakan Madiun, beberapa pimpinan PKI banyak yang tewas, sementara yang lolos banyak yang lari ke RRC maupun Soviet. Setelah berdiam di Moskow selama setahun D.N Aidit kembali ke Indonesia dan merebut kepemimpinan PKI lewat Kongres Ke-5 pada tahun 1954, pada kongres ini D.N Aidit berhasil menggantikan pemimpin lama PKI yaitu Tan Liang Djie dan Alimin.²¹ berdasarkan instruksi Moskow dalam mencapai tujuan PKI menggunakan jalan parlementer untuk memperkuat kedudukannya, dan dua tahun setelah itu PKI dengan kepemimpinan D.N Aidit membuktikan kepada dunia bahwa mereka mendapatkan urutan ke-4 dalam pemilu tahun 1955. Setelah pengambilan alih kepemimpinan Aidit mulai memperhatikan rakyat jelata, dengan petani sebagai focus utama

¹⁹ *Ibid.*, h. 29.

²⁰ Taufik Abdullah, et al, *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisi Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), h. 87.

²¹ Pusat Sejarah TNI, *Sejarah Penumpasan Pemberontakan PRRI/PERMESTA*, (Jakarta: Pusat Sejarah TNI, 2012), h. 28.

analisisnya. Dengan tegas Aidit mengkritik bahwa hasil KMB sangat merugikan pihak Indonesia, karena bagaimanapun juga, Belanda masih mengendalikan Indonesia, Irian Barat masih wilayah Belanda, sumber daya ekonomi dan pabrik-pabrik vital masih dikuasai oleh Belanda. Dari analisis ini Aidit menawarkan transisi kepemimpinan dari para tuan tanah yang menjilat Belanda ke sebuah pemerintahan rakyat.²²

Kemudian Aidit mengevaluasi program lama partai yaitu Nasionalisasi lahan, pada aspek ini Aidit melihat program tersebut sangat bertentangan dengan aspirasi petani yang belum memiliki lahan. Untuk itu Aidit mengubahnya menjadi “lahan untuk petani” dari sini gagasan Aidit pada bidang pertanian sangat detail, mulai dari menurunkan harga sewa tanah, pajak, menghilangkan system kerja paksa, meningkatkan mutu benih dan distribusi pupuk harga terjangkau, perbaikan saluran irigasi sampai pada membangun sekolah-sekolah pertanian.²³

Berdasarkan analisis yang dilakukan Mortimer, (2011: 24-30) aidit bersama Lukman dan Nyoto merupakan generasi yang dilahirkan dan dibentuk oleh suasana revolusi, sehingga mereka mampu memimpin dan membuat PKI bangkit dari keterpurukan pasca peristiwa Madiun. Aidit dilahirkan di Medan pada 30 Juli 1923, ayahnya merupakan pegawai kehutanan dan pernah menjadi Parlemen. Ketika menganjak dewasa Aidit pernah bergabung di organisasi Persatuan Timur muda, kemudian bergabung di Gerindo dibawah kepemimpinan Amir Syafrudin disini ia mendapatkan pemahaman kiri radikal. Dari M. Yusuf pemimpin PKI illegal ia mendapatkan pinjaman Buku Das capital berbahasa Belanda.²⁴

Akan tetapi ada satu kejelasan, yakni pembasmian anggota PKI Madiun adalah buah dari konflik berkepanjangan yang berlangsung

²² Rex Mortimer 2011. *Indonesian Communism Under Sukarno; Ideologi dan Politik, 1959-1965*. Jakarta: Pustaka Pelajar, h. 40.

²³ Ibid. h. 42.

²⁴ Rex Mortimer 2011. *Indonesian Communism Under Sukarno; Ideologi dan Politik, 1959-1965*. Jakarta: Pustaka Pelajar, h. 24-30.

lama. Di dalam kubu sosialis sendiri terjadi saling tikam dari belakang, kita bisa menganalisis bagaimana kejatuhan Kabinet Sjahrir dan Kabinet Amir. Padahal yang mengusung kedua Kabinet tersebut adalah koalisi akbar dikalangan golongan kiri sendiri. Namun pada kenyataannya, kelompok kiri juga tidak mendukung program kedua kabinet tersebut dan menyalahkan, dengan mengatakan, “jatuhnya Kabinet Sjahrir merupakan kesalahannya sendiri”. Kondisi politik pada jaman revolusi memang agak sulit di analisis, kita akan sulit mengidentifikasi mana golongan kiri benaran (yang bukan penghianat rakyat) dan mana yang menjadi kaki tangan Belanda dan Jepang, Misalnya ketika Rustam Effendy membongkar Jaringan Setiadjud dengan kawannya Abdul Madjid, lalu Amir yang diketahui pernah mengambil uang untuk kepentingan pembentukan sel atau Jaringan Bawah Tanah. Begitu juga dengan Bung Karno dan Bung Hatta yang di tuduh oleh Muso sebagai makelar romusha. Sulit sekali menemukan tokoh nasional yang tidak pernah bekerjasama dengan penjajah. akhirnya penulis berpendapat Sjahrir lebih konsistensi dalam perjuangannya tanpa cacat dan tanpa menjual kepala bangsa Indonesia di pihak penjajah. bahkan Syahrir adalah tokoh yang sangat anti-Fasisme yang diterapkan Jepang. Selain Syahrir, penulis melihat Tan Malaka merupakan figur yang bersih dari bekerjasama dengan pihak Belanda maupun Jepang, Tan Malaka tetap konsisten dengan Persatuan Perjuangannya, namun lagi-lagi karena perbedaan kepentingan, Tan Malaka dianggap pemberontak dan dieksekusi tanpa diketahui dimana kuburannya.

Mengapa Sosialisme-Komunisme dapat diterima dengan baik dikalangan masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan, salah satu alasan logis yang masuk akal adalah banyak tokoh pendiri bangsa lebih khususnya yang berpendidikan luar negeri seperti Hatta, Syahrir, Iwa kusumasumantri telah memilih doktrin Marxisme sebagai alat perjuangan, begitu juga dengan tokoh Nasional yang berpendidikan di Indonesia seperti Soekarno dan Tan Malaka mereka banyak mempelajari Marxisme dan memilihnya sebagai ideologi gerakan

mereka. Walaupun dalam pelaksanaannya menggunakan simbol dan bendera yang berbeda-beda.

Menilai fakta sejarah tidak semestinya kita melihat, sikap patriotik dari para pelaku Sejarah, mereka yang pernah berkorban demi Kemerdekaan Republik Indonesia, namun selain kita melihat sejarah yang romantik saja, kita juga harus memberanikan diri melihat dan menjabarkan Sejarah dengan apa adanya, termasuk penyimpangan-penyimpangan individu pada jaman Revolusi tersebut. Sehingga kita juga sebagai generasi tidak terlalu berlebihan memberikan pengkultusan kepada para pendiri Bangsa ataupun pejuang kemerdekaan. Namun karakter dan jiwa patriotik mereka adalah merupakan sebuah keharusan untuk ditiru dan diteladani oleh generasi selanjutnya.

B. Kondisi Politik Tahun 1960-an

Kondisi dunia pada tahun 1960an, tengah terjadi perang dingin antara negara-negara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan Negara-negara Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Hal ini mendorong kedua negara tersebut berebut pengaruh di kawasan negara-negara dunia ketiga termasuk di Negara Indonesia. Kesulitan-kesulitan Amerika dalam Peperangannya melawan Vietnam menjadi bahan pertimbangan Amerika untuk tidak secara terbuka dan terang-terangan ingin berkonfrontasi dengan Indonesia terlebih lagi, Indonesia merasa benci kepada Inggris yang ingin membentuk Negara Boneka Malaysia. Posisi Amerika pada tahun 1960an sangat khawatir jika seandainya negara-negara Asia Tenggara jatuh ketangan Komunis, apalagi pada saat itu, sudah jelas-jelas negara seperti Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos jatuh ke tangan pihak komunis, tinggal menunggu Indonesia. Akibat kekalahannya dengan negara Vietnam, Amerika secara ekonomi sudah kekurangan anggaran dalam membiayai perang, apalagi ingin membuat masalah dengan Indonesia secara terbuka. Dengan adanya peristiwa Gestapu

membuat Amerika sangat gembira atas kesuksesan Angkatan Darat dan Mahasiswa melengserkan Presiden Soekarno.

Ditengah-tengah pengaruh kedua blok tersebut, justru Indonesia dibawah kepemimpinan Soekarno mengambil jalan tengah dengan mendirikan apa yang disebut sebagai gerakan Non-Blok. Walaupun pada tahap selanjutnya diam-diam mendukung Blok Komunis Antara lain Uni Soviet dan RRT. Karena pada saat itu, PKI yang dipimpin oleh DN Aidit mengikuti garis politik RRT. RRT dalam garis perjuangannya menggunakan laras Bedil untuk mencapai kekuasaan, dengan semboyan Desa mengepung Kota.

Sejalan dengan itu, Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin Oktober 1956 dan hal ini sangat di dukung oleh PKI, termasuk Angkatan Darat. Namun, Moh. Hatta sangat tidak senang dengan sikap Soekarno yang mengarah kepada sikap otoriter, Desember 1956 Moh. Hatta mengundurkan diri dari Wakil Presiden Indonesia. Akhirnya pada September 1957 muncul resistensi dari daerah Sumatera yaitu ketika pembentukan-pembentukan Dewan Banteng di Ketua oleh Letkol Ahmad Husein, Dewan Gajah oleh Simbolon, Dewan Garuda oleh Barlian dan Dewan Permesta oleh Sumual. Sebelumnya mereka telah sepakati "*Piagam Palembang*" sebagai bentuk tuntutan mereka pada pihak pusat.

Adapun Program Perjuangan mereka yang tertuang dalam Piagam Palembang berisi enam pokok tuntutan yaitu; 1) Pemulihan Dwitunggal, 2) Penggantian pimpinan Angkatan Darat, 3) Otonomi Daerah, 4) Pembentukan Senat, 5) Peremajaan Birokrasi, 6) Larangan terhadap ajaran Komunis.²⁵ Di sisi lain juga, ada beberapa pimpinan Masyumi dan PSI yang ikut menyingkir dari pusat menuju Sumatera, akibat ada ancaman dari kelompok Komunis, karena pimpinan Masyumi dan PSI menentang PKI dan ormasnya yang mengambil alih perusahaan Belanda.

Berdasarkan Analisis Mestika Zed dalam makalahnya yang disampaikan pada tanggal 14 Maret 2009 di STKIP PGRI Padang. Bahwa

²⁵ Pusat Sejarah TNI, *Ibid.*, h. 71.

sepanjang pertengahan 1958 sampai 1961 terjadi perang gerilya kedua belah pihak antara PRRI dan APRI pada situasi ini terjadi beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak APRI seperti terjadi penyalahgunaan wewenang, terror, pemerkosaan dan pembunuhan. Sehingga dampak perang gerilya masing-masing merugikan kedua belah pihak diantaranya; dari pihak APRI sebanyak 983 terbunuh, 1.695 terluka dan 154 hilang. Sementara dari pihak PRRI terbunuh 6.373 orang, terluka 1.201 dan tertangkap sebanyak 6.057.

Sejak penerapan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959 Soekarno dengan dukungan militer mereduksi peran partai politik kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Seumur hidup atau menjadikan dirinya sebagai Raja Nusantara. sehingga dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya, DPR dan MPR hanyalah sebagai boneka politik yang hanya mengamini apa yang menjadi kebijakan Presiden Soekarno. bahkan isi pidato sang Presiden menjadi keputusan Presiden yang sama sakralnya seperti Undang-undang dan peraturan lainnya. Dalam system demokrasi terpimpin terdapat segitiga kekuasaan yang menancapkan kukunya dan saling bersaing yaitu; Sukarno, AD dan PKI. Dimana ketiga kekuasaan tersebut sama-sama mempertahankan posisi masing-masing dengan berhati-hati. Namun, Sukarno yang merasa dirongrong oleh Angkatan Darat merangkul PKI dalam cabinet sebagai kekuatan yang akan mengimbangi kekuatan Angkatan Darat. Maka dilahirkanlah apa yang kita sebut sebagai Nasakom. Sukarno yang mengerti akan jalannya revolusi Indonesia, tidak ingin menyingkirkan PKI karena efeknya akan terjadi perpecahan nasional. Pada aspek militansi dan radikal PKI dan sukarno terdapat kesamaan, apalagi PKI sebagai organisasi massa dapat digunakan Sukarno dalam menandingi Angkatan Darat. Dan mendukung kampanye-kampanye patriotik ala Sukarno. Sukarno yang mengalami masa pergerakan awal jaman kolonialisme sangat mengerti perjuangan PKI. Bahkan Sukarno tidak malu menyebut PKI sebagai kerabat sedarah. Sementara pada sisi lain PKI berusaha meyakinkan Sukarno bahwa partai akan mendukung

seutuhnya konsep presiden dengan menerima keseluruhan Pancasila dan Manipol Usdek. Selain itu PKI akan menghambat kerjasama PNI-Masyumi dalam mendukung kebijakan pro Barat serta menghadang segala tindakan Angkatan Darat dalam mengambil alih kekuasaan. Disini PKI terus berusaha untuk mengurangi sisi segitiga kekuasaan pada sebelah kanan dan memperbesar sisi kiri segitiga kekuasaan tempatnya berada.

Maka tidak heran, ketika Moh. Hatta mengundurkan diri dari Wakil Presiden menjadi rakyat biasa, hal ini disebabkan Dwi tunggal sudah tidak sejalan lagi dalam mengendarai Republik Indonesia. Sehingga Moh. Hatta tidak segan-segan mengkritik konsep Nasakom yang diterapkan oleh Bung Karno dalam sebuah majalah Muhammadiyah Bung Hatta mengatakan, “di Indonesia ada dua jalan yaitu jalan setan dan jalan Allah, salah satu jalan setan adalah Nasakom”.

Penerapan demokrasi terpimpin mengumumkan bentuk perpolitikan baru, sistem ini menggunakan pola mereduksi peran partai politik. Walaupun Presiden Sukarno sebagai figur yang paling utama dalam perpolitikan Indonesia pada masa itu, namun dalam realitas politik Indonesia pada masa itu, semakin lama semakin menunjukkan persaingan antara kedua kubu antara Angkatan Darat dan PKI. Setelah sukses mempengaruhi Presiden Soekarno untuk membubarkan Masyumi dan PSI, kini PKI berhadapan dengan Angkatan Darat, apalagi setelah Angkatan Darat sukses menumpas pemberontakan-pemberontakan dari kelompok kanan radikal yang ingin mendirikan negara Islam seperti DI/TII Jawa Barat dan Aceh, kepercayaan masyarakat pada TNI (Angkatan Darat) semakin besar. Bagi PKI di tahun-tahun merupakan cobaan berat, sehingga berupaya melakukan kerjasama dengan PNI dalam mencapai tujuan politiknya. Bagi PKI demokrasi Terpimpin merupakan Pil pahit yang harus ditelan. Karena keberhasilan mereka pada demokrasi parlementer tidak berarti sama sekali. Akan tetapi, dalam upaya memperbesar pengaruh partai mau tidak mau, suka tidak suka PKI harus terus

berada disamping Sukarno dengan terus memuja Sukarno, menerima Pancasila. Bahkan dalam sebuah pidatonya, Aidit, menyebutkan bahwa Sukarno adalah guru pertamanya dalam aliran Marxisme-Leninisme. Namun, bukan berarti di lingkaran PKI tidak ada yang membenci Sukarno, sebab mereka melihat sang Presiden memiliki gaya hidup glamour, poligami dan pembelajaran rutin kepresidenan yang terbangun sia-sia.²⁶

Disisi lain Presiden Soekarno sedang genjar-genjar nya mengutuk Negara Malaysia sebagai antek-antek Kapitalisme Barat, dengan mengkampanyekan Isu “Ganyang Malaysia”. Perang berbatasan antara Indonesia-Malaysia secara kecil-kecilan di hutan-hutan kalimantan di menangkan oleh pihak pasukan Malaysia dan Inggris. Pada bulan Mei Soekarno menugaskan Marsekal Omar Dhani memimpin Komando Siaga untuk melanjutkan konfrontasi dengan Malaysia. Pada bulan Agustus-September 1964, Indonesia melancarkan serangan kecil di semenanjung Malaysia Barat, dan hal tersebut, tanpa sepengetahuan Jenderal Ahmad Yani. Anehnya, politik Presiden Soekarno untuk mengganyang habis Malaysia, kurang didukung oleh beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, hal ini dibuktikan ketika Jenderal S Parman menugasi Mayjen Soeharto agar mengirim agen-agen untuk menghubungi para pejabat tinggi Malaysia dan Inggris untuk meyakinkan mereka bahwa Angkatan Darat tidak menginginkan perang. Kemudian di satu sisi Angkatan Udara sangat setia terhadap kebijakan Presiden Soekarno dan mendukung seratus persen Operasi pengganyangan Malaysia. Disini antara Angkatan Darat dan Angkatan Udara saling bertolak belakang dalam merespon operasi pengganyangan Malaysia. Sehingga membawa efek bagi Angkatan Darat karena kurang mendapatkan kepercayaan dari Presiden Soekarno.

Begitu bencinya Presiden Soekarno terhadap Malaysia saat itu, sehingga lewat pidatonya Soekarno mengajak rakyat Indonesia untuk mengganyang Malaysia. Berikut pidato Soekarno.

²⁶ Rex Mortimer., *Op Cit.* h. 101.

*“Kalau kita lapar itu biasa, kalau kita malu itu juga biasa. Namun, kalau kita lapar dan malu itu karena Malaysia kurang ajar. Kerahkan pasukan ke Kalimantan, kita hadjar tjetjunguk Malayan itu, pukul dan sikat djangan sampai tanah dan udara kita dinjak-indjak oleh Malaysia keparat itu. Doakan aku, aku akan berangkat ke medan djuang sebagai patriot bangsa, sebagai martir bangsa, dan sebagai peluru bangsa yang enggan diindjak-indjak harga dirinja. Serukan keseluruh pelosok negeri bahwa kita akan bersatu untuk melawan kehinaan ini, kita akan membalas perlakuan ini dan kita tunjukan bahwa kita masih memiliki gigi dan tulang jang kuat dan djuga masih memiliki martabat. Ayo... ayo... kita...Ganyang...Ganyang Malaysia... Ganyang Malaysia...Bulatkan Tekad, semangat kita Baja, Peluru kita banyak, nyawa kita banyak, Bila perlu satoe-satoe”.*²⁷

Kondisi politik yang sangat panas pada Tahun 1960-an mencapai puncak pertarungan, baik Antara Partai Politik Kanan dan partai Kiri maupun pihak Angkatan Darat dengan PKI, bahkan sampai merembes ketinggian Seni dan Budaya, saling Hujat-menghujat merupakan hal yang biasa pada saat itu, sehingga kelihatan sekali mana kelompok kiri dan mana kelompok Kanan dan tidak ada tempat bagi yang berada di posisi tengah. Retorika dan kata-kata pada saat itu, penuh dengan retorika yang berbau Revolusioner yang tidak Revolusioner dikatakan Kapitalis Birokrat akan di Ganyang dan di anggap sebagai antek-antek Neokolim. Pengaruh keluarnya Indonesia dari PBB membawa efek yang parah bagi kondisi ekonomi Indonesia saat itu, inflasi mencapai 650 %. Pemerintah Soekarno menghadapi dua masalah yang besar dan sama-sama penting yaitu membebaskan Irian Barat yang sedang dalam cengkeraman Pemerintah Kolonial Belanda dan mengusir Inggris/Amerika dari tanah Malaya yang ingin memecah belah Nusantara dengan membentuk pemerintahan Boneka Federasi Malaysia. Posisi pemerintah dalam keadaan terjepit.

Perang dingin membawa efek yang sangat buruk bagi Indonesia, Soekarno berada dalam posisi simalakama, antara jatuh ke tangan

²⁷ Suwelo Hadiwijoyo, *Ajaran-ajaran Spektakuler bung Karno dan Pak Harto*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), hh. 74-75.

Kapitalis (Barat) atau ikut Komunis, serba salah. Namun pada akhirnya Soekarno memilih ikut berpihak kepada Komunis, setelah melihat sikap Amerika yang bermain di belakang layar akibat keterlibatan Amerika mendukung PRRI/Permesta, dalam kasus Malaysia Inggris memanasakan suasana dengan membentuk negara boneka Federasi Malaysia. Selain itu, mungkin alasan lain Soekarno berpihak kepada Komunis karena tidak mau rugi dengan konsep Nefos dan Ganefo yang ia rencanakan akan di buka tahun 1966 dan ternyata di hambat oleh meletusnya Gestapu 65. Gedung Ganefo yang dibangun atas bantuan Rusia dan China, sekarang Ganefo telah menjadi Gedung DPR/MPR. Cita-cita besar Soekarno untuk membangun tatanan dunia baru, putus di tengah jalan, karena badai G 30 S yang menerjang bangunan Nasakom sehingga runtuh.

Kondisi memang tak terelakkan, saling melindungi antara Sukarno dengan PKI tidak berlangsung lama. Sejak awal memang secara garis perjuangan ideology antara partai dengan Tentara memang tidak pernah ketemu. Dimana pada masa-masa krisis dan situasi revolusi Angkatan Darat selalu terdepan dalam mengusir penjajahan Belanda melalui gerilya. Sementara di sisi lain partai politik selalu menggunakan jalur diplomasi yang cenderung merugikan Indonesia. Pasca Merdeka Tahun 1950 berlakunya demokrasi Parlementer/ Liberal Partai justru menunjukkan ketidakkompetennya mereka dalam mengurus Negara dan bahkan terlibat dalam korupsi dan perebutan kekuasaan di internal partai. Di sisi lain pihak Partai cenderung memandang rendah kontribusi Tentara dalam Revolusi. Partai cenderung menciptakan banyak masalah dalam negeri seperti yang dilakukan oleh PKI pada peristiwa Madiun 1948 kemudian Masyumi dan PSI pada Tahun 1958. Sehingga partai selalu berhadapan dengan Tentara dalam setiap gejolak nasional. Dengan demikian Tentara melihat Partai lebih sebagai penghianat Negara dan cenderung pro pihak Kolonialisme.

Kepemimpinan Angkatan Darat memang tidak dapat dianggap sama dengan Partai politik seperti Masyumi, PSI bahkan PKI. Karena

Angkatan Darat cenderung mengambil sikap politik Independen sejak awal berdirinya sampai akhir kepemimpinan Presiden Sukarno. Angkatan Darat diakui oleh rakyat karena loyalitas dan semangat patriotiknya mengantarkan Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbeda halnya Masyumi dan PSI yang dianggap sebagai Komprador yang dapat disetir pihak asing. Begitu juga dengan PKI yang dianggap sebagai anak kandung Soviet dan China serta cenderung anti Agama.

Meski pada aspek perebutan sumber daya ekonomi hasil peninggalan Belanda. Antara PKI dan Angkatan Darat sering merebut posisi sebagai pewaris. Akan tetapi, Angkatan Darat sukses melakukan pengambil alihan asset yang ditinggalkan oleh Belanda. Oleh PKI hal ini menjadi alat Prapoganda mereka dengan menuduh Angkatan Darat sebagai Kapitalis Birokrat. Pada awal Tahun 1960 an prapoganda PKI makin meluas dalam melemahkan posisi Angkatan Darat. Ketika Angkatan Darat menerapkan hokum darurat perang pada Tahun 1957. Hal ini memberikan peluang bagi angkatan darat untuk leluasa bergerak pada bidang politik salah satunya membatasi ruang gerak partai-partai dalam skala yang lebih luas. Hal ini jika kita tinjau kembali sejak awal bahwa kemunculan Demokrasi Terpimpin pad Juli 1959 sebenarnya merupakan efek dari desakkan Angkatan Darat terhadap Sukarno, dimana pada saat itu, antara Sukarno dengan Angkatan Darat sama-sama mulai muak dengan gaya partai politik yang selalu mengintervensi politik Sukarno maupun Angkatan Darat sendiri melalui pengangkatan-pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Sehingga atas saran Angkatan Darat tersebut Sukarno mulai membuat peran partai politik melemah sedikit demi sedikit. Melalui peran politiknya tersebut Angkatan Darat pula mendapatkan jatah kursi 76 kursi di Kabinet melalui jalur fungsional. Dan hal ini membuat geram PKI. Untuk itu, melalui rapat Parlemen, PKI yang diwakili Sudisman mulai melontarkan kritik tajam terhadap besar anggaran militer dan tidak efektifitas penggunaannya. Bukan saja itu, Sudisman berani menyoroti secara individu Jenderal Nasution yang

memiliki sikap berbeda ketika berada di luar militer dan sedang berada di lingkaran cabinet.²⁸

Di kalangan mahasiswa muncul kekecewaan dan generasi Angkatan 66 yang tergabung dalam beberapa organisasi seperti KAMI dan KAPPI melakukan perlawanan dengan cara demonstrasi dan pemboikotan. kondisi pemerintah semakin terdesak, harga-harga semakin naik dari Rp 200 menjadi Rp. 1000, harga bensin dari Rp 4 menjadi Rp. 250 sehingga mengakibatkan kenaikan harga-harga pada saat itu. Aksi semakin panas, sementara Subandrio-Chairul dengan berani mengeluarkan peraturan baru yang merupakan devaluasi rupiah Uang Rp. 10.000 dan Rp. 5.000 ditarik dari peredaran dan nilainya di potong 10 persen.²⁹ kondisi ekonomi yang kian memburuk inilah, fakta bahwa Pemerintah Soekarno terlalu gesa-gesa mengambil langkah kebijakan memutuskan hubungan dengan PBB serta membangun gedung mercu suar yang membawa Indonesia dalam guncangan politik dan ekonomi yang sangat hebat. oleh masyarakat dan generasi saat itu tidak mempercayai lagi Soekarno untuk memimpin Indonesia selanjutnya.

Sindiran dan Olok-olokan di Seminarkan, dipublikasi di depan umum, terjadi polemik yang membosankan dan menjengkelkan antara Kelompok Seni (Kelompok Kanan) dengan Manifestasi Kebudayaan atau (Manikebu) dalam istilah Budayawan/ seniman kiri, yang diplesetkan menjadi *manikebo* yang berarti *Mani* dan *Kerbau*. sungguh sebuah perilaku cendekiawan yang bobrok. Namun itulah kondisi kebudayaan dan perilaku para Budayawan, Cendekiawan dan Seniman pada saat itu, yang memiliki ciri khas masing-masing yaitu, Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) yang berhaluan kiri dibawah pimpinan Pramoedya Ananta Toer serta kawan-kawannya Sitor Situmorang, Utuy Tatang Sontani dan Bakri Siregar. Dan Manifestasi Kebudayaan (Manikebu) dibawah pimpinan Taufik Ismail dengan kawan-kawannya, Wiratmo Sukito, Usmar Ismail, Taufik Ismail, D.S

²⁸ Rex Mortimer., *Loc cit.* h. 124.

²⁹ Soe Hok Gie. *Catatan Seorang Demontran.* (Jakarta: LP3S. 2016.), H. 129.



G 30 S DALAM RAGAM VERSI

A. G 30 S Skenario PKI

Mengenai peristiwa Gerakan 30 September 1965 menurut kebanyakan masyarakat Indonesia pasti mengidentikkan peristiwa tersebut dengan PKI atau dalang dari peristiwa G 30 S adalah PKI. Apalagi selama 32 tahun Orde Baru telah sukses mendoktrin bangsa Indonesia bahwa peristiwa Gerakan 30 September merupakan bentuk penghianatan yang dilakukan PKI terhadap Negara Indonesia dengan melakukan pembantaian secara sadis dan tidak manusiawi terhadap 6 Jenderal, 1 orang Polisi, dan seorang anak kecil tewas akibat keganasan PKI. Selain itu, narasi-narasi dalam buku teks sejarah yang diajarkan disekolah memaparkan bagaimana kekejaman dan kebengisan PKI serta muncul tokoh yang bernama Soeharto sebagai pahlawan yang menyelamatkan Indonesia dari belitan krisis sosial-ekonomi yang sangat parah. Hal tersebut Akibat kebobrokan sistem yang diterapkan oleh Orde Lama.



Sebelum dan sesudah peristiwa Gerakan 30 September ditemukan beberapa bukti bahwa PKI memang sudah berencana melakukan kudeta atau pembantaian terhadap beberapa jenderal tersebut yang dianggap sebagai Kapitalis Birokrat, diantara bukti tersebut yaitu, pernyataan anggota politbiro CC PKI, Anwar Sanusi di hadapan para sukarelawan BNI pada tanggal 29 September 1965, yang menyatakan sebagai berikut:

“Kita sedang dalam situasi dimana ibu pertiwi dalam keadaan “hamil tua”. Sang bidan siap dengan alat yang diperlukan untuk menyelamatkan sang bayi yang sudah lama dinantikan. Sang bayi adalah kekuasaan politik yang sudah ditentukan dalam Manipol. Sang bidan adalah massa rakyat Manipolis. Sukwan adalah suatu alat yang penting di tangan sang Bidan. Ada segelintir setan yang mengancam keselamatan Ibu Pertiwi dan Bayi yang akan dilahirkan.”

Dalam buku putih yang diterbitkan oleh Kesekretariatan Negara Republik Indonesia, bahwa Isu Dewan Jenderal yang disebarakan oleh Biro Khusus PKI dengan tujuan memperburuk citra Angkatan Darat di mata Soekarno dan di mata masyarakat Indonesia. hal ini merupakan perang urat syaraf yang paling ampuh yang dilancarkan oleh PKI. Pada tanggal 30 September 1965. Menpangau Laksdya Udara Omar Dani mendengar informasi tersebut tidak berusaha mencegahnya, bahkan memberi petunjuk kepada Brigjen TNI Soepardjo untuk mengutamakan keselamatan Presiden Soekarno dan pada tanggal 30 September 1965 malam memutuskan untuk tidur di Komando Operasi Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.⁴¹ akhirnya muncul dugaan kuat di kalangan Angkatan Darat bahwa Halim dijadikan markas oleh kelompok Gerakan 30 September dan memaksa pasukan RPKAD menyerbu markas tersebut.

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasan*. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994), h. 63



Gambar 5. Soekarno, Omar Dhani dan Menpangad Jenderal Ahmad Yani.

Pada Tanggal 1 Oktober 1965 dilakukan penculikan terhadap ketujuh perwira Angkatan Darat. 1). Penculikan terhadap Jenderal Nasution dipimpin oleh Pelda Djahurub. 2) Penculikan terhadap Jenderal Ahmad Yani yang dipimpin Peltu Mukidjan. 3) Penculikan terhadap Mayjen TNI Soeprapto yang dipimpin oleh Letda Sulaiman. 4) Penculikan terhadap Mayor Jenderal Suwondo Parman yang dipimpin oleh Serma Satar. 5) Penculikan terhadap Mayjen TNI Haryono. Mas Tirtodarmo dipimpin oleh Serma Bungkus. 6) penculikan terhadap Brigjen TNI Sutoyo. Siswomihardjo dipimpin oleh Serma Surono. 7) penculikan terhadap Brigjen TNI Donal Izacus Panjaitan dipimpin Serda Sukardjo. ⁴² dalam penculikan tersebut Nasution berhasil lolos, namun putri dan ajudannya berhasil di bunuh oleh sekelompok pasukan G 30 S.

Selain versi buku putih yang diterbitkan oleh Kementrian Sekretaris Negara, teori mengenai keterlibatan PKI dalam peristiwa 1 Oktober 1965, antara lain juga dikemukakan oleh Firof Fauzan selaku anggota Komnas HAM. Berdasarkan Keputusan Komnas HAM Nomor 22/KOMNAS HAM/VII/2004 tertanggal 1 Juli 2004. Tentang

⁴² *Ibid*, hh. 96-101.

pembentukan Tim Pengkajian Pelanggaran HAM oleh PKI hasilnya sebagai berikut.⁴³

1. Peristiwa Sejarah Tragedi Nasional 1 Oktober 1965, bukanlah soal keblingernya pimpinan PKI, tapi terjadi peristiwa itu adalah hak preyogatif Ketua CC PKI. D.N Aidit.
2. Tentang dugaan kelihaiian peran intelejen asing bukan dari CIA, Inggris maupun Australia, tapi pengakuan dan kenyataan di lapangan dilakukan oleh Dinas Intelejen Cekoslovakia yang sudah beroperasi sejak tahun 1964 terkait dengan “dokumen ghiilchrist”.
3. Adanya dugaan perwira progresif Revolusioner perwira berpikiran maju dalam G 30 S adalah tidak benar.

Menurut mantan simpatisan PKI yang juga seorang Jurnalis melihat kehancuran PKI akibat peristiwa G 30 S merupakan kesalahan Ketua PKI D.N Aidit, PKI, anggota beserta simpatisannya. Dalam kesaksiannya Imam Achmad mengatakan;

*“Disamping Aidit karena ulahnya, partai, anggota dan simpatisan, termasuk saya sebetulnya juga bersalah sebab membiarkan sang ketua malang melintang berbuat semaunya sendiri. Tapi, saya percaya, kalau G 30 S itu sempat berhasil, tentu sang ketua akan menjadi diktator, tetapi bukan diktator proletariat melainkan diktator kultus individu, mengkultuskan dirinya seperti yang pernah terjadi pada Stalin atau Kim Il Sung”.*⁴⁴

Studi Lin & Galway, (2022) Aidit dan Lukman sukses melahirkan Inovasi baru terkait Strategi Marxisme-Leninisme-Maoisme di Indonesia. Yaitu mengupayakan aliansi kelas dengan melibatkan petani dan kerjasama dengan partai-partai dan mencoba menjauhi metode kekerasan. Aidit melihat penderitaan bangsa Indonesia disebabkan pengaruh kapitalisme global. Untuk itu ia mengupayakan

⁴³ Firos Fauzan. *Pelurusan Sejarah Tragedi Nasional 1 Oktober 1965 Penghianatan Biro Khusus PKI*. (Jakarta: Firos Fauzan. 2009.), h. 5.

⁴⁴ Imam Achmad dan Dirgantara Wicaksono. *Marxisme dan Kehancuran PKI*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), h. 123- 124.

perebutan kekuasaan dengan cara-cara yang sah melalui jalur pemilu. Akan tetapi, kegagalan G 30 S menggagalkan niat tersebut. Namun, satu hal yang dianggap sukses bagi PKI karena mereka berhasil Meng-Indonesiakan Marxisme-Leninisme.⁴⁵

Menurut Fauzan, bahwa peristiwa pada tanggal 1 Oktober 1965 adalah merupakan Kudeta yang dilakukan oleh Biro Khusus yang menamakan dirinya Dewan Revolusi PKI. Sehingga menurutnya pemerintah harus merubah Hari Kesaktian Pancasila menjadi “Hari Kudeta Dewan Revolusi PKI” penghianatan terhadap Pancasila.



Gambar 6. Dipa Nusantara Aidit sedang Kampanye Tahun 1955.

Pada peristiwa Gestapu, PKI memainkan Kamufase politik yang begitu luar biasa bagus. sehingga mampu mengaburkan keterlibatannya. ibaratnya siasat lempar batu sembunyi tangan. Sehingga pelaku G 30 S tidak terlihat dalang tunggal justru, muncul dalang ganda seperti, Ketua CC PKI D.N. Aidit, Oknum TNI/POLRI Binaan PKI, Wayang adalah Letkol Untung (PKI Baju Hijau). Menarik apa yang disebut dengan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan

⁴⁵ Hongxuan Lin and Matthew Galway. “Heirs to What Had Been Accomplished”: D. N.Aidit, the PKI, and Maoism, 1950–1965., *Modern Intellectual History* (2022), 1–29. p, 28-29.

(MKTBP), yang diterapkan oleh PKI di Indonesia. Ini bisa kita pahami bahwa Revolusi ala Rusia semata-mata mengandalkan kaum buruh sebagai ujung tombaknya. Sedangkan Revolusi kebudayaan ala RRC andalan utamanya adalah kaum tani. Disinilah titik kulminasi pemikiran sang ketua CC PKI menggunakan MKTBP. Sehingga di pakailah Dewan Revolusi PKI sebagai alat Revolusi atau yang biasa disebut sebagai Revolusi ala Indonesia, karena dalam Dewan Revolusi terdapat perwira progresif yang telah dibina oleh Biro Khusus atau yang sudah menjadi PKI Baju Hijau. Ciri khas Revolusi PKI yang diterapkan di Indonesia adalah menggunakan TNI sebagai alat Revolusi.

Menurut Dimas Anom, dalam Skripsinya menyatakan, “bahwa peristiwa Gerakan satu Oktober yang terjadi di Jakarta hanyalah satu rangkaian dari kudeta nasional yang dilakukan oleh PKI. Pusat kegiatan kudeta ternyata dilakukan di Jawa Tengah dengan Surakarta sebagai Yenannya Tiongkok. Tidak ada kudeta yang berhasil tanpa dukungan militer, oleh karena itu keberhasilan kudeta Aidit sangat bergantung Infiltrasi PKI di kalangan militer”.⁴⁶

Harold Crouch dalam Rossa mengatakan “bahwa perwira militer itu adalah dalang-dalang yang melibatkan anggota-anggota PKI sebagai korban penipuan”. Lanjut Crouch mengatakan, “PKI memang sangat terlibat. Namun tetap sebagai pemain kedua”.⁴⁷

Menurut Anhar Gonggong dalam pernyataannya ketika dilansir oleh *informata.com*, ia mengatakan “Tetapi saya sebagai seorang siswa pada periode itu, peristiwa 65 itu saya pikir PKI terlibat. Karena di tahun itu adalah krisis perkelahian antara berbagai ideologi. PKI berteriak untuk membubarkan HMI salah satunya. Banyak hal yang bisa membuat kita berkata demikian. Memang kondisi waktu itu sangat krusial. Paling tidak, saya punya dugaan dari sini PKI

⁴⁶ Dimas Anom Hanang, *Dampak Pemberontakan PKI Jawa Tengah pada Tahun 1965*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas PGRI. 2014), hh. 8-9.

⁴⁷ John Rossa, *Dalih Pembunuhan Massal*, (Jakarta: Hasta Mitra. 2008), h. 105.

memang terlibat, dan memang itu perlu diteliti lebih lanjut”.⁴⁸ dalam wawancara tersebut, Anhar juga menyinggung tentang mengapa Soeharto sebagai perwira tinggi tidak di culik, diakhir pembicaraan ia mengatakan generasi kita banyak yang sudah mengalami Amnesia Sejarah, Pancasila tinggal slogan belaka.

Sesuatu yang tidak diduga, ternyata sastrawan Iwan Simatupang telah menujumkan sejak tanggal 4 Februari 1965, bahwa PKI akan melakukan *Coup*. Menurutnya, “Aidit boleh seribu kali membantah, tapi rakyat dan ABRI kita makin teringat pada Madiun”. Aidit pula telah menggertak, bila di tahun 1948 PKI dengan anggota Cuma seratus ribu orang bisa bikin korban begitu banyak, bagaimana dengan PKI sekarang yang sudah punya anggota tiga juta ?. secara aljabar kelas 1 SMP tentu seramnya lebih tiga puluh kali, jadi mayat yang akan bergelimpangan akan tiga puluh; darah kering, gedung-gedung pembantaian (yang mungkin nanti mereka sebut *Marx House*) tebalnya tiga puluh kali dari darah kering yang ditemukan di ubin *Marx House*.⁴⁹ sebagai seorang yang hidup dijamin tersebut, Iwan memiliki ketajaman analisis, sehingga ia melihat kekejaman PKI akan sangat parah dari Peristiwa Madiun.

Lebih jauh lagi Iwan melihat peristiwa G 30 S mirip kudeta Hourri Boumediene di Aljazair yang menggulingkan Ahmed Ben Bella, alasannya Ben Bella tidak begitu keberatan terkait ikutnya Rusia dan Malaysia dalam konferensi Asia Afrika II. Sedangkan motif Untung adalah ingin memforsir Kabinet Nasakom, yang disebabkan keberatan dari Jenderal-jenderal anti-komunis. Bahkan Iwan, meragukan keterlibatan CIA, yang oleh PKI menuduh Murba antek CIA, BPS antek CIA, HMI, antek CIA, Dewan Jenderal antek CIA. Sampai-sampai nyamuk yang makin banyak di Jawa Barat, yang oleh D.N Aidit dan kawan-kawan disebabkan oleh CIA juga. Iwan

⁴⁸ <http://arsipindonesia.com/bincang/prof-dr-anhar-gonggong-kita-amnesia-sejarah-pancasila-masih-sebatas-slogan/> di akses tanggal 7 Juli 2016.

⁴⁹ Iwan Simatupang, *Tragedi G-30-S dalam Bayang-bayang Bung Karno Sang Peragu: Kesaksian Kebudayaan atas prolog-Epilognya*, editor Th. Bambang Murtianto. (Jakarta: Insan Merdeka, 2013), h. 14.

dengan menggunakan logika terbalik, lihaihnya intelejen Amerika atautkah pintarnya Intelejen Peking yang sering menghasut PKI agar semua yang tidak revolusioner disebut antek CIA.⁵⁰ di pihak PKI mengkampanyekan bahwa yang tidak sejalan dengan politik PKI dan Bung Karno dianggap antel-antek CIA, namun oleh kelompok yang anti-komunis mengatakan yang berpihak pada PKI merupakan anjing-anjing peking, tidak terlepas pula ditujukan pada menteri-mentri yang dianggap terlibat PKI, salah satunya adalah Soebandrio.

B. Konflik Internal Angkatan Darat

Persaingan PKI dengan Angkatan Darat bukan sesuatu yang asing lagi dalam kancah politik Orde Lama, kefiguran Bung Karno yang menjadi Presiden yang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia membuat PKI dan Angkatan Darat harus pandai-pandai mencuri hati Bung Karno. Dulu ketika Kabinet Sjahrir dan Kabinet Amir memang pemerintahan dijalankan oleh orang-orang kiri. Namun ketika, Kabinet Hatta memimpin pemerintahan dan menjalankan program Re-Ra, orang-orang kiri atau yang berhaluan komunis di kalangan TNI Masyarakat merasa dirugikan sehingga membuat pihak FDR/ PKI memprotes pemerintah yang berujung pada peristiwa Madiun. Orang-orang PKI yang menjadi tentara antara lain yaitu Mayor Djoko Sudjono dan Mayor Jenderal Ir. Sakirman kakak kandung dari Jenderal S. Parman yang menjadi korban keganasan G 30 S.

Pada tahun 1964 D.N Aidit selaku ketua CC PKI telah membentuk apa yang disebut Biro Khusus sebagai sel yang akan melakukan infiltrasi di dalam kubu Angkatan Darat, mengapa D.N. Aidit membentuk Biro Khusus dan membangun kembali kekuatannya di kalangan Angkatan Darat? Sangat jelas bahwa beberapa simpatisan PKI yang ada di Angkatan Darat yang lolos peristiwa Madiun inilah yang menjadi dasar pemikiran D.N Aidit. Sehingga D.N Aidit tidak

⁵⁰ Iwan Simatupang, *Ibid.*, hh. 134-135.

terlalu sulit merekrut ulang para simpatisannya dalam lingkup Angkatan Darat.

Pada tahun 1965 D.N Aidit berpidato dengan menyatakan sebagai berikut.

*“...30 % baju hijau adalah kepunyaan PKI, oleh Aidit dikatakan bahwa ceramah secara 4 gelombang di depan Angkatan Bersenjata mutlak menambah kekuatan di tubuh PKI mengingat baju hijau legal yang dipersenjatai Manipol tidaklah mengkhawatirkan. Tidak bisa dipergunakan begitu saja untuk menembak rakyat. Dan menerima komando mereka malah pasti militer tetap memihak rakyat”.*⁵¹

Mengenai ketidakpuasaan beberapa perwira bawahan dalam Angkatan Darat bukan sesuatu hal yang aneh, misalnya ketidakpuasaan Brigjen Soepardjo ketika memimpin pasukan di Kalimantan Utara, lantaran tidak dikirim pasukan elit, karena pada dasarnya Panglima Angkatan Darat tidak mendukung perjuangan Menganyang Malaysia. Selain itu, Nasution dengan Ahmad Yani memiliki pengalaman buruk dengan para perwira bawahan mereka. Misalkan, ketika Presiden ingin memutuskan akan mengkat Brigjen M. Yusuf menduduki jabatan wakil perdana menteri bidang ekonomi. Dan hal ini ditolak oleh Jenderal Ahmad Yani alasannya Yusuf masih muda dan banyak dari kalangan Jenderal lain yang akan tersinggung.

Ketegangan lain yang memperparah keadaan adalah, ketika pada tahun 1952 Jenderal Nasution memerintahkan anak buahnya untuk mengarahkan Tank ke depan Istana Presiden. Tuntutannya adalah Soekarno harus membubarkan parlemen. Akibat dari peristiwa ini, Nasution tidak lagi diberikan posisi strategis dalam kepemimpinan Angkatan Darat, Nasution hanya diberi Jabatan Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang tugas nya secara adminstratif tidak lagi berurusan dengan pasukan. Tindakan Presiden Soekarno ini, membuat hubungan Nasution dan Ahmad Yani kurang harmonis. Bahkan Presiden Soekarno menugasi beberapa perwira tinggi lain untuk

⁵¹ Taufik Abdullah, dkk. *Malam Bencana 1965 dalam belitan krisis nasional*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009.), h. 114.

mendamaikan Nasution dan Yani. Pada bulan April 1965 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 200 perwira tinggi angkatan darat dalam rangka mendamaikan Nasution dan Jenderal Ahmad Yani, namun keduanya tetap saja tidak hadir, dalam pertemuan tersebut melahirkan tiga janji setia TNI yang di kenal dengan *Tri Ubaya Sakti*. Secara politik, Sukarno mulai tidak suka kepada Nasution, sehingga pada Tahun 1962 Nasution diberikan fungsi administratif sebagai KSAB. oleh Sukarno dan tidak memiliki komando lagi atas MBAD. Semenjak meninggalnya Djuanda, fungsi Nasution benar-benar di lumpuhkan di MBAD. Kemudian pada bulan Mei 1964, Nasution di non aktifkan lagi di lembaga PARAN yang oleh Sukarno di gantikan oleh KOTRAR yang dipimpin langsung olehnya. Sehingga tidak mengherankan apabila Sundhaussen berkesimpulan, “Sukarno berani menghina Nasution depan public supaya mereka sebagai bawahan mengetahui tidak ada seorangpun yang dapat melawan sukarno. Dan memang Sukarno menunjukkan dendam kesumatnya terhadap musuh-musuhnya”.⁵²



Gambar 7. Jenderal Besar Nasution bersama Kivlan Zen dan Prabowo Subianto.

⁵² Ulf Sundhaussen. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3S., h. 284.

Analisis yang paling terkemuka adalah Ben Anderson dan Ruth McVey yang ditulis dalam Cornell Paper, menurut analisis kedua ahli tersebut bahwa perwira tingkat bawah yang berpikiran maju, melihat para Jenderal/Perwira tinggi di kalangan Angkatan Darat sudah terlalu korup, kosmopolitan dan telah melupakan anak buahnya yang serba kekurangan. Pada intinya dalam Cornell Paper melihat G 30 S merupakan murni konflik internal Angkatan Darat.

Dalam lingkungan Angkatan Darat minimal ada empat subkelompok diantaranya, 1) Kelompok Jenderal Ahmad Yani, 2) Kelompok Jenderal A. Nasution, 3) Kelompok Soeharto, 4) Kelompok Biro Khusus yang di bina oleh PKI.

Menurut Iwan Gardono Sujatmiko Sosiolog Universitas Indonesia melihat perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI dengan tiga pola yaitu:

Pertama, gerakan sosial dengan menggalang kekuatan buruh, tani dan militer serta tuntutan Angkatan Kelima. Kedua, melakukan kudeta proxy dengan menggunakan perwira jaringan PKI serta di dukung oleh 2000 sukarelawan PKI. Kudeta ini bertujuan untuk mengubah keseimbangan segitiga kekuasaan antara PKI, Soekarno dan Angkatan Darat. Ketiga, pola ini merupakan pola baru dimana PKI membonceng tokoh non-PKI, yakni Soekarno dalam payung ideologi Nasakom. Pola ini gagal tetapi berhasil di Kamboja dimana Pol Pot berkoalisi dengan Sihanouk. Setelah Pol Pot menang pada tahun 1975, Sihanouk akan dibunuh tetapi berhasil di lindungi oleh Chou Enlai, tetapi lima dari 14 anaknya dibunuh oleh Partai Komunis Kamboja.⁵³

C. Soekarno, Nasakom dan G 30 S

Kecurigaan-kecurigaan muncul ketika Presiden Soekarno, tidak pergi ke Istana malah menuju pangkalan Halim Perdana Kusuma. Sehingga anggapan Soeharto dengan kawan-kawannya. Soekarno terlibat dalam Gestapu, kemudian diperkuat lagi dengan sikap Bung Karno menunjuk Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai Caretaker

⁵³ Iwan Gardono Sujatmiko, *Revolusi, Kudeta, Rekonsiliasi*, (Kompas, Rabu 27 Juli 2016), h.6.

MenPangad, sehingga posisi Mayjen Soeharto menjadi sulit dalam menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI tersebut. Penunjukan Jenderal Pranoto sebagai Caretaker Menteri Panglima Angkatan Darat, menurut versi Orde Baru bahwa Pranoto adalah pendukung atau simpatisan PKI, karena Pranoto pernah melibatkan pemuda rakyat dalam operasi penumpasan PRRI/Permesta. Yang menolak pengangkatan Pranoto bukan saja datang dari Soeharto namun juga datang dari Jenderal Nasution, yang pada saat itu lolos dari penculikan, lalu aktif kembali di Kantor Kostrad. Sungguh menjadi pertanyaan besar, karena pimpinan Dewan Revolusi adalah pasukan Cakrabirawa, sehingga sebagian pakar melemparkan tuduhan mereka kepada Presiden Soekarno sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam peristiwa malam bencana, penculikan Jenderal-Jenderal yang sangat setia pada Pancasila tersebut.

Beberapa catatan penting yang terjadi di Halim, ketika Presiden Soekarno berada di Halim⁵⁴:

- Tanggal 30 September 1965 Kol M. Saelan datang ke Halim mempersiapkan rumah komodor Sutanto untuk akomodasi Bung Karno
- Terjadi konsultasi antara presiden dengan Gerakan 30 September di Halim, terutama dengan Brigjen Supardjo yang menjadi Komandan lapangan G 30 S
- Brigjen Soepardjo melapor kepada presiden Soekarno bahwa PKI setuju dengan pengangkatan Mayjen Pranoto Reksosamudro menjadi caretaker Men/Pangad.
- Saat pertemuan di Halim yang dihadiri oleh Men.Pangal Laksamana Martadinata, Men.Pangau Laksamana Omar Dhani, brigjen Soeparjo, dan beberapa periwra G 30 S, Presiden Soekarno meminta saran siapa pengganti Jenderal Yani sebagai panglima AD. Men/Pangal Laksamana Martadinata mengusulkan Mayjen Soeharto, sesuai dengan standing order AD, tetapi

⁵⁴ Ibid. H. 60-61

ditolak presiden. Presiden mengangkat Mayjen Pranoto sebagai Menpangad.

- Tokoh-tokoh Eks Tentara Pelajar, Martono, Ahmadi dan Hartawan ketika menghubungi Presiden Soekarno di Halim dan surat jawaban Presiden Soekarno kepada Martono yang dibuat di Halim pada tanggal 1 Oktober 1965 yang pada pokoknya berbunyi: “Martono, Ahmadi dan Hartawan jangan membantu Jenderal Harto.” Hal ini dilaporkan Martono pada tanggal 3 Oktober 1965 malam kepada Jenderal Nasution.

Dalam pembukaan Mukernas HMI di Istana Bogor pada 19 Desember 1965. Presiden berkata “djenazah-djenazah pemuda rakyat, BTI, orang-orang PKI, simpatisan PKI di sembelih, dibunuh kemudian di biarkan di pinggir jalan dibawah pohon, dihanyutkan dan tidak ada yang mengurusnya”.

Menurut Samsuddin, dalam pidato tersebut justru Bung Karno tidak menyinggung 22 Jenazah aktivis Marhaenis yang dibantai PKI. Dan juga tidak menyebut kematian 6 orang Jenderal yang diculik dan dibunuh secara keji oleh pasukan G 30 S / PKI.⁵⁵ justru menganggap bahwa Gerakan 1 Oktober (Gestok) merupakan riak-riak kecil gelombang kecil dalam Samudera, berarti Presiden Soekarno menganggap Peristiwa penculikan terhadap para Jenderal adalah masalah kecil bukan masalah besar. Dan itu biasa dalam Revolusi.

Selain itu, menurut Samsuddin ditemukan pula indikasi kuat bahwa Bung Karno telah melindungi tokoh-tokoh yang terlibat Gerakan 30 September, seperti:

- Mengijinkan Omar dani nginap di Istana Bogor, kemudian memberi tugas ke luar negeri dengan menggunakan alasan dalam rangka (Komando Pelaksana Pembangunan Industri), kemudian berhenti di Pnom Penh sampai dengan tanggal 20 April 1966.
- Tidak mengambil tindakan hukum terhadap Brigjen Soepardjo, yang sudah jelas-jelas salah dalam kajian hukum

⁵⁵ Ibid. H. 120-121.

- Begitupun terhadap DN. Aidit, Bung Karno tidak pernah menyinggung mengenai proses hukum DN. Aidit, justru Bung Karno menawarkan tempat yang aman di Jakarta. Dan memberikan tanggapan positif terhadap surat Aidit.
- Soekarno sesuai pernyataannya tanggal 6 Oktober 1965 dalam sidang kabinet Dwikora di Bogor yang sedianya akan memberikan *political solution*, terhadap masalah PKI ternyata malah membentuk kabinet 100 menteri yang didalamnya banyak orang-orang pro PKI.

Menghilangnya Omar Dhani dari hiruk pikuk politik Indonesia selama beberapa bulan menuju Pnom Penh, semakin mencurigakan orang-orang Soeharto bahwa Omar Dhani memang terlibat dalam peristiwa G 30 S. walaupun pada dasarnya secara kelembagaan pihak AURI tidak terlibat hanya oknum-oknum AURI lah yang memang terlibat. Itu sudah pernah dijelaskan oleh Mayjen Soeharto secara detail.

Peristiwa G 30 S menurut beberapa pendapat dan teori merupakan skenario Soekarno untuk melenyapkan oposisi beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. dengan menggunakan Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi presiden. Ini merupakan masih misteri yang belum terungkap dengan jelas. Kecurigaan ini disebabkan karena beberapa pasukan penculik di dominasi oleh pasukan Cakrabirawa yaitu pasukan pengawal Presiden.

Presiden Soekarno bertanya, “Apa dirinya mau menerima perintah yang akan mencakup tindakan terhadap para Jenderal yang tidak loyal” dijawab oleh Untung, “Jika Bapak membiarkan kita menindak terhadap para Jenderal, Saya akan melaksanakan perintah apapun dari Pemimpin Besar”.⁵⁶

Iwan juga menambahkan teori lain terkait G 30 S, menurutnya, bahwa Coup Untung Cs hanya semacam peristiwa pembakaran

⁵⁶ Petrik Matanasi. *Untung, Cakrabirawa dan G 30 S*, (Yogyakarta: Trompet. 2011), h. 15.

Reichstag saja yang justru disuruh dan dibiayai oleh Hitler sendiri.⁵⁷ Kalau memang Bung Karno tega melakukan hal demikian, berarti ia sengaja mengorbankan anak buahnya, Letkol Untung sebagai tumbal kepentingan politik beliau, agar mengakhiri riwayat musuh-musuh politiknya yang dianggap menghalangi perkembangan Nasakom.

Perasaan tidak senang Presiden Soekarno terhadap kalangan Angkatan Darat bukan suatu hal yang asing bagi kalangan tokoh pada saat itu. Hal ini disebabkan pada tahun 1952 beberapa perwira pusat mengadakan unjuk kekuatan dengan membawa tank-tank serta artileri militer serta demonstran sipil sekitar 30.000 orang.⁵⁸ Tank-tank tersebut diarahkan ke Istana Negara, dan hal ini menurut Soekarno merupakan upaya kudeta terhadap kekuasaannya. Dalam kalangan Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani selaku Menpangad merupakan anak emasnya Presiden Soekarno, karena penolakkan terhadap Nasakomisasi dan ragu untuk melakukan penggantian terhadap negara Malaysia justru dianggap oleh Soekarno sebagai bentuk pembangkangan terhadap dirinya sebagai Presiden.

Kaitan dengan kejadian 17 Oktober 1952 Presiden sangat trauma, setelah kejadian tersebut Soekarno mulai ragu dengan kesetiaan Angkatan Darat lebih-lebih kepada Jenderal Nasution. Peristiwa 17 Oktober 1952 selain menon-aktifkan Jenderal Nasution dari pimpinan Angkatan Darat, juga mengakhiri karir militer T.B Simatupang, karena perwira tinggi militer ini, berani mendesak Soekarno untuk membubarkan parlemen. Soekarno dengan tegas tidak mau diintervensi apalagi dipaksa. Mulai saat itu, Soekarno tidak menganggap lagi Angkatan Darat setia terhadapnya, sehingga dalam hal penugasan Soekarno banyak memilih Angkatan Udara sebagai komandan operasi, termasuk operasi pembebasan Irian Barat.

Hal yang menarik untuk diungkapkan adalah, gaya penampilan Soekarno di muka publik, Soekarno agar terlihat berwibawa dan

⁵⁷ Iwan Simatupang, *Op. Cit.*, h. 145.

⁵⁸ M.C Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. (Jakarta: Gajah Mada University Press. 1999), h. 369.

kharismatik di mata dunia internasional sering menggunakan kostum ABRI, baik Angkatan Udara maupun Angkatan Laut, namun jarang sekali memakai seragam Angkatan Darat, mungkin disebabkan Angkatan Darat pernah tidak setia kepadanya. Dhani, R., Lee, T., & Fitch, K. (2015:32). Dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa Sukarno memiliki visi persatuan nasional dan berusaha mewujudkan seluruh bangsa dalam dirinya. Menggelorakan pembangunan karakter bangsa serta mendesak dunia internasional untuk menghentikan imperialism dan kolonialisme yang bercokol di dunia timur. Untuk itulah, mengapa dunia barat menganggap Sukarno sebagai musuh mereka. Dalam mempertahankan hegemoni kekuasaan sukarno hampir sama dengan Suharto generasi setelahnya yang cenderung otoriter serta menggunakan kampanye ketakutan melalui control media, dan hal tersebut semata-mata bertujuan untuk menyatukan seluruh elemen bangsa.⁵⁹ selanjutnya, Suharto menggunakan ideology Anti Komunisme dengan bersandar pada Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi Negara untuk menakuti rakyat, sehingga partai politik dan ormas dapat dikontrol dengan baik. Siapapun yang Anti Pancasila akan dibasmi atas nama Negara.

Terkait keterlibatan sang Presiden pada peristiwa G 30 S, A.H Nasution selaku Korban Peristiwa Gerakan 30 September mengatakan, bahwa Pada 29 September 1965 Jenderal Soeparjo sendiri, menghadap Presiden di Istana, dan cukup lama berbicara. Hal tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa Suparjolah yang menjadi tokoh utama militer, dalam peristiwa G 30 S yang menjadi penghubung utama PKI dan Bung Karno dalam “operasi bersama” terhadap Jenderal-Jenderal Angkatan Darat, Yani dan Kawan-kawan, dan Saya. Tapi Letkol Untung yang menjadi Ketua Dewan Revolusi”.⁶⁰ Sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Sundhaussen bahwa Sukarno sangat setuju mengenai pembentukan Angkatan Kelima hal tersebut berdasarkan

⁵⁹ Dhani, R., Lee, T., & Fitch, K. (2015). *Political public relations in Indonesia: A history of propaganda and democracy*. Asia Pacific Public Relations Journal, 16(1), 23–36

⁶⁰ Tianlean, Bakri A.G. *A.H. Nasution, Bisikan nurani Seorang Jenderal: Kumpulan wawancara dengan media massa*. (Jakarta, Mizan. 1995), h.89.

pembicaraanya bersama pemimpin China Chou En Lai November 1964. Kemudian pada Pidatonya di HUT 17 Agustus 1965; yang menyinggung tokoh-tokoh yang berpura-pura Pancasilais dan menerima Nasakom di depannya, tapi sebenarnya di belakangnya bertolak belakang, Sukarno menegaskan, bahwa pertahanan suatu Negara merupakan upaya maksimal dari kita semua sbagaimana termaktub dalam Pasal 30 UUD 1945 bahwa ; “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negaranya”.⁶¹

Kaitan dengan peristiwa politik sepanjang 1964-1965 yang perlu diperhatikan adalah iklim politik pada saat itu dimana, pasar kabar angin sengaja digunakan oleh seluruh kekuatan politik pada masa itu, tujuannya adalah untuk memfitnah musuh-musuh politik mereka. Oleh karena itu, menurut Sundhaussen, posisi Sukarno, Subandrio, dan para pemimpin PKI melancarkan Insinuasii yang tak disertai bukti sedikitpun, tapi bermanfaat bagi tujuan politik mereka. Kemudian mengenai kebijakan-kebijakan Sukarno dalam proses pengambilan keputusan, Sukarno tidak tegas dalam proses ini. Sukarno justru bersembunyi dibalik kedua kekuatan politik yang ada. Dalam bukunya, Sundhaussen memberikan fakta yang dapat di Analisis, dimana pada malam hari 30 September 1965 berkumpul semua tokoh-tokoh kunci gerakan diantaranya; Letkol Untung, Brigjen Soepardjo, Latief, Letkol Heru Atmodjo, Mayor Sujono, Mayor Gatot Sukrisno, serta Omar Dhani. Dimana pada pukul 9 pagi Sukarno tiba di Halim dan disambut oleh Omar Dhani. Dan setelah itu, Soepardjo melapor kepada Sukarno mengenai jalannya aksi.⁶²

Hal yang sangat luput dari tulisan-tulisan mengenai G 30 S adalah bagaimana kondisi Nasution setelah lolos dari penculikan, dan mengapa Soekarno awalnya ingin menuju Istana, namun setelah mendapatkan laporan bahwa Jenderal Nasution lolos, kemudian mengarahkan tujuannya ke Halim. Walaupun Soekarno ke Halim adalah merupakan *standing order*. Tapi beberapa tokoh menilai sikap

⁶¹ Ulf Sundhaussen. *Op Cit.*, h. 340.

⁶² *Ibid.*, h. 344-345.

Soekarno seakan-akan mendukung G 30 S. bahkan berada dibalik Gerakan tersebut. Pada aspek ini kita dapat memulai pertanyaan sebagaimana yang diajukan oleh Sundhaussen dalam bukunya, “jika para perwira itu tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk melakukan penculikan yang sangat berbahaya terhadap atasan mereka, kemudian misalkan mereka juga tidak berada dibawah pengaruh PKI, lalu apa yang mendorong mereka, untuk melakukan sebuah gerakan yang berbahaya tersebut ?. disinilah kita dapat memulai analisisnya, dimana semua orang mengetahui betul bahwa Sukarno pagi hari 1 Oktober 1965 menuju Halim setelah ke enam Jenderal tersebut di culik dan di bunuh sekitar sana. Kemudian, secara resmi Soepardjo memberikan Lapornya kepada Sukarno dan setelah itu Sukarno membuka komunikasi dengan pihak yang terlibat dalam gerakan tersebut dalam menetapkan pengganti Jenderal Ahmad Yani.⁶³

Menurut Fic dalam bukunya bahwa Nasution dibawa oleh Letkol Hidayat Wirasonjaya, Komandan Staf Markas Besar AD ajudannya Mayor Sumargono dan Ipar laki-laki Nasution, Bob Sunaryo Gondokusumo, ke persembunyian baru. Mereka terus khawatir pembunuh akan terus mengejar mereka. Ternyata kekhawatiran tersebut memiliki alasan kuat. Karena tidak lama setelah Nasution lolos seorang anggota Cakrabirawa datang ke rumah mencari dia dan menanyakan di mana Nasution. Setelah itu datang Letkol Ali Ebram, Kepala Unit Intelejen Cakrabirawa, disertai beberapa anak buahnya yang tanpa seragam, dengan mengatakan kepada orang di rumah tersebut, bahwa Presiden memerintahkannya untuk mencari keterangan dimana Nasution bersembunyi. Sangat Jelas, begitu Leimana menghubungi Soekarno bahwa Nasution selamat. Langsung saja Presiden Soekarno mengirim regu pembunuh untuk mengejarnya. Hal ini mengapa Presiden khawatir ketika Soeparjo melaporkan pada pukul 10.30 Wita. bahwa Nasution lolos.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, h. 358-359.

⁶⁴ Sulastomo, *Dibalik Tragedi 1965*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Umat, 2006) h. 266-267.

Selain itu, bisa kita analisis mengapa Jenderal Nasution sangat ngotot untuk mengadili Presiden Soekarno di Mahkamah Militer Luar Biasa, tapi keinginan Nasution tersebut di tolak oleh Soeharto. Sebenarnya dalam hal ini, Nasution memiliki kepentingan untuk melengserkan Soekarno dari kekuasaan, sementara Soeharto cukup mengambil alih Angkatan Darat dan membubarkan PKI saja, walau pada akhirnya secara perlahan-perlahan Soeharto memiliki ambisi untuk menjadi penguasa Indonesia dengan dukungan militer secara menyeluruh.



Gambar 8. Bung Karno sedang berbincang dengan Mao

Victor M Fic menyimpulkan bahwa Peristiwa G 30 S adalah hasil konspirasi antara Aidit, Mao dan Soekarno itu sendiri. Karena pada tanggal 5 Agustus 1965 Aidit bertemu dengan pemimpin besar Cina, Mao. Dari diskusi tersebut Aidit mendapat saran dan masukan dari Mao agar memukul lebih duluan sebelum Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan, setelah itu presiden di pensiunkan dan istirahat di Danau Angsa Cina. Apabila hal ini disetujui oleh Soekarno, Mao siap akan memberikan bantuan 30.000 pucuk senjata untuk memukul para

Jenderal reaksioner tersebut.⁶⁵ hal ini memperkuat dugaan keterlibatan Presiden dalam Gerakan 30 September. Kedekatan Soekarno dengan Aidit serta sikap Soekarno mendukung ide-ide Partai Komunis, juga memperkuat dugaan Angkatan Darat terkait keterlibatan mereka pada peristiwa G 30 S tersebut. Banyak orang-orang yang anti-Soekarno mengatakan bahwa Soekarno terlibat dalam G 30 S baik secara langsung maupun tidak langsung. Sikap Soekarno sendiri yang tidak mau membubarkan PKI tidak lain, karena ia sudah lama mendeklarasikan ideologi Nasakom tersebut demi mempertahankan keseimbangan politik dan menjaga persatuan. Atas kepentingan itulah Presiden Soekarno sulit untuk membubarkan PKI. cita-cita Soekarno untuk mempersatukan ketiga aliran politik tersebut sudah ia konsepsikan sejak dari tahun 1930-an. bagi Soekarno sendiri ideologi Komunis merupakan kenyataan sosial masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan dan sampai pada tahun 1965 adalah Revolusioner. Soekarno masih membutuhkan PKI dalam rangka mendukung pengganyangan Malaysia. Intinya menurut Soekarno, PKI memiliki jasa bagi perkembangan kemerdekaan Indonesia, karena telah mengusir kaum penjajah dari Nusantara.

Setelah peristiwa penculikan pagi hari kira-kira pukul 08.00 Wib Presiden Soekarno berniat menuju Istana, namun melihat ada beberapa pasukan yang berkeliaran disekitar Istana, ia membelok menuju Halim, di Halim ia bertemu dengan Omar Dhani dan tokoh-tokoh kudeta lainnya. Walaupun tidak secara terbuka, mendukung usaha kudeta tersebut, mungkin, ia mendengar enam Jenderal terbunuh dan Nasution selamat,⁶⁶ tidak ada yang membantah bahwa, kehadiran Soekarno di Pangkalan Halim memang akan memperkuat kecurigaan di kalangan Perwira Angkatan Darat lebih-lebih, Jenderal Nasution dan Mayjen Soeharto yang saat itu berada di Markas Kostrad.

⁶⁵ Fic. Victor M. *Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Studi Tentang Konspirasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005), hh. 77-82

⁶⁶ M.C Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: Serambi, 2008), h. 584

Pada prinsipnya hubungan Soekarno-Aidit merupakan hubungan semu, bukan tidak mungkin, kedekatan tersebut untuk menunggu warisan kekuasaan dari Soekarno. Hatta pernah mengingatkan Soekarno akan bahaya bekerjasama dengan PKI yang pernah melakukan makar pada tahun 1948 di Madiun.⁶⁷ Namun apa yang dikhawatirkan oleh Moh. Hatta terbukti juga, akibatnya pihak PKI yang selalu dilindungi oleh Presiden Soekarno memanfaatkan keadaan untuk mencapai popularitas politik dalam meraih dukungan masyarakat.

Kebijakan politik Soekarno yang mengidam-idamkan Ideologi Nasakom agar dapat berjalan mulus dan bertahan lama, ternyata berubah drastis 360 derajat, Nasakom bagaikan senjata Bumerang yang menyerang balik sang pemiliknya. Nasakom tidak seperti sambal makanan, yang ketika dicampur Garam dengan Cabe kemudian menghasilkan cita rasa tinggi bagi yang menyantapnya. Namun, hal tersebut tidak demikian, Nasakom Ibarat Rakitan Bom waktu yang ketika ada orang yang mencabut kabelnya secara mendadak, Lalu Bom waktu tersebut pun meledak dengan dasyat. Itulah seputar Gagasan Nasakom. Nasakom sebagai Bom Waktu dibuat di Indonesia untuk dipergunakan menghancurkan Kapitalisme Barat. Namun, meledak seketika di rumahnya sendiri dan gagal meledakkan rumah-rumah negara tetangga.

Gagasan Nasakom Soekarno yang ketika awal-awal diperkenalkan pada masyarakat Indonesia merupakan gagasan yang bertujuan menyatukan ketiga ideologi yaitu Nasionalisme, Agama dan Komunisme. tapi, semua itu pada pelaksanaannya mendapatkan rintangan dan penolakan yang dasyat dari kalangan Angkatan Darat. Dan seiring dengan berjalannya waktu dengan Nasakomnya Soekarno menjadi Sang Peragu dalam setiap pengambilan kebijakannya. Namun terkadang kebijakan juga di paksa atas nama Nasakom dan politik keseimbangan, segala kebijakan diambil secara otoriter.

⁶⁷ Peter Kasenda. *Bung Karno Panglima Revolusi*, (Yogyakarta: Galang Pustaka. 2014), h. 247.

Kalau kita mau memberikan penilaian yang obyektif kepada Soekarno, baik sebagai tokoh pergerakan nasional, sebagai Presiden dan sebagai manusia biasa, maka penilaian tersebut, haruslah seimbang, misalnya mengenai jasa-jasa beliau dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, di posisi ini seorang Soekarno adalah satu-satunya agen yang tidak ada duanya yang dapat menghantarkan Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan. Namun, disisi lain Soekarno sebagai Presiden, dicabut mandatnya oleh MPRS karena dinilai telah menerapkan kebijakan mendukung PKI. Hal ini bisa kita ketahui pada bunyi Konsideran MPRS No/XXXIII/MPRS/1967 dibawah ini.

“a. Bahwa keseluruhan Pidato Presiden Mandataris MPRS pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul “Nawaksara” dan Surat Presiden Mandataris MPRS tertanggal 10 Januari No. 01/Pres/1967 tentang pelengkap Nawaksara, tidak memenuhi harapan rakyat pada umumnya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada khususnya, karena tidak memuat secara jelas pertanggungjawab tentang kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan kontra revolusi G-30-S/PKI beserta epilognya, kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak;

Dst., dst.,

MEMUTUSKAN

Dst., dst.,

Pasal 3

Melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya Ketetapan ini menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945” ...⁶⁸

Moedjanto berpendapat bahwa, “peranan Presiden Soekarno pada jaman Orde lama disebutkan di sini semata-mata agar supaya dalam penghormatan kita kepada beliau atas jasa-jasa beliau yang luar

⁶⁸ G. Moedjanto, *dari Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2003), h. 184.

biasa pada jaman pergerakan Nasional sampai Proklamasi, kita tidak sampai membutakan diri terhadap kenyataan, bahwa selama Jaman Orde Lama itu beliau memberikan keleluasaan bergerak kepada PKI, dan bahkan mendukung partai itu dengan menyingkirkan kekuatan-kekuatan Pancasila yang dapat mengimbangi kaum komunis itu dengan predikat “kontra-revolusioner”, marhaenis gadungan”, dan lain sebagainya, suatu kebijaksanaan yang akhirnya bermuara di Lubang Buaya...⁶⁹

Namun pada hakikatnya Presiden Soekarno merupakan seorang Nasionalis sejati (bukan Komunis) yang menginginkan ketiga Ideologi tersebut hidup berdampingan dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Karena konsep Nasakom tersebut sudah ia rancang sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Terlebih lagi Soekarno adalah Bapak Marhaenisme Indonesia, dalam ungkapan beliau, “Marhaenisme merupakan Marxisme dalam penerapannya di Indonesia”. Jadi hakikatnya Soekarno adalah seorang yang sudah mendalami paham Marxisme sejak muda sampai ia menjadi Presiden, konsep Marxisme tetap ia jalankan.

Mengapa Presiden Soekarno ingin menyatukan berbagai ideologi yang berbeda paham, padahal sudah jelas Pancasila sebagai landasan negara Indonesia, mengapa harus ada lagi Nasakom yang menjadi masalah. Menurut Presiden Soekarno sendiri dalam pidatonya di acara CGMI di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 29 September 1965 bahwa “ide Nasakom lahirnya pada tahun 1926, perkataan Nasakom baru muncul di alam kemerdekaan. Karena itu di dalam Panca Ajimat, kalau menurut waktu disebutkan terlebih dahulu Nasakom, kemudian Pancasila, oleh karenanya Pancasila lahirnya tanggal 1 Juni 1945, Nomor tiga barulah Manipol Usdek, Nomor empat Trisakti dan Nomor lima Berdikari”⁷⁰

⁶⁹ G. Moedjanto, *Ibid.*, h. 185.

⁷⁰ Iman Toto K. Rahardjo & Herdianto WK. *Bung Karno Gerakan Massa dan Mahasiswa Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 96.



BEBERAPA PROFIL PELAKU DAN SAKSI G 30 S

A. Syam Sang Misterius, Bukan Agen CIA

Membicarakan Syam Kamaruzzaman sama dengan kita membicarakan Siluman, kenapa tidak, karena bagi sebagian besar masyarakat Indonesia Syam merupakan Manusia Siluman, yang sampai sekarang jejaknya tidak di ketahui sama sekali. Dalam berbagai Cerita Syam sering diyakini sebagai Agen ganda bahkan triple Agen. Namun siapa Syam sebenarnya, merupakan hal yang misterius untuk diketahui. Keberadaan Syam memang ibarat hantu, yang bisa masuk dan menghasut siapapun, baik itu golongan komunis, Angkatan Darat maupun CIA.

Syam Kamaruzzaman dilahirkan di Tuban, Jawa Timur, 30 April 1924 dari ayah seorang penghulu dan ibu keturunan ningrat. Aktif semasa sekolah dalam kepanduan Muhammadiyah Hizbul Wathan (sama dengan Jenderal



Sudirman). Ia tertarik politik karena pernah ikut dan bergabung pada kelompok Pathuk di Yogyakarta. Syam bekerja sebagai intel polisi di Pati, Jawa Tengah, atasannya Mudigdo merupakan pengikut setia Amir Syarifuddin, Mudigdo memiliki anak perempuan yang dijadikan istri oleh D.N Aidit ketua PKI. lewat kedekatannya dengan Mudigdo inilah, Syam mengenal D.N.Aidit. dan menjadi Ketua Biro Khusus yang bertanggungjawab langsung kepada D.N. Aidit.

Menurut Lecrec, Mudigdo dan pengikutnya ditangkap TNI dan ditembak mati pada 21 November 1948. Istri Mudigdo pada saat itu melanjutkan kegiatannya sebagai aktivis Komunis sampai ditahan setelah pecahnya Gestapu, 1965. Siti Aminah pernah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan posisi tertingginya dalam kubu PKI adalah sebagai Wakil Ketua Gerwani, organisasi wanita naungan PKI.¹⁰¹

Syam mengaku ditugaskan Aidit untuk memimpin Biro Khusus. Biro Khusus ini adalah Biro rahasia dalam PKI yang bertanggungjawab langsung kepada ketua PKI serta untuk melakukan tugas-tugas khusus yang sangat rahasia. Yang tidak diketahui anggota PKI secara umum.

Menurut Oei Tjoe Tat, Syam merupakan tokoh terpenting yang membuat bukan saja PKI, tetapi juga kekuatan-kekuatan politik nasionalis, runtuh dalam beberapa hari seperti rumah kertas. Semua itu bermuara pada hancurnya bangunan Orde Lama dengan tiang penyangga Nasakom dan munculnya bangunan Orde Baru dengan Tiang penyangga Pancasila serta dinding-dinding ekonomi pembangunan.¹⁰²

Dari beberapa pandangan diatas, penulis memiliki keyakinan bahwa Syam Kamaruzaman adalah tokoh PKI yang sejak lama di kenal oleh D.N Aidit sehingga D.N Aidit mempercayai Syam untuk memimpin Biro Khusus yang di bentuk secara rahasia oleh Aidit. Selain itu, Syam pernah menyelamatkan D.N Aidit ketika melarikan

¹⁰¹ Salim Haji Said. *Gestapu 65, PKI, Aidit, Soekarno dan Soeharto*. Bandung: Mizan. 2015, h. 168

¹⁰² A. Pambudi. *Op. Cit.*, h. 299.

diri setelah pecahnya pemberontakan Madiun. Pada saat itu Syam bekerja sebagai buruh pelabuhan di Tanjung Priok. Syam juga yang memalsukan identitas D.N Aidit.

B. Kesaksian Bambang Widjanarko yang Diragukan

Bambang Widjanarko dilahirkan 9 September 1929 di Karanganyar, Kebumen Jawa Tengah. Dengan nama lengkap Geraldus R. Bambang Setyono Widjanarko, Tahun 1943 masuk PETA di Gombang Jawa Tengah. Alumni sekolah Staf dan Komando TNI AD (SSKAD) Bandung Tahun 1968.

Ada beberapa poin penting dari kesaksian Bambang Widjanarko yang harus dijelaskan disini, karena kesaksian Bambang Widjanarko mengenai surat yang diberikan oleh Kolonel Untung kepada Presiden Soekarno melalui anggota Cakrabirawa bagian Hiegiene serta pengakuan Bambang Widjanarko atas kehadiran Brigjen Soepardjo di Halim yang melaporkan keberadaan tokoh-tokoh PKI, hal tersebut berdasarkan hasil diskusi dan pembicaraannya dengan Kolonel Maulwi Saelan, tapi kesaksian Bambang Widjanarko tersebut dibantah keras oleh Maulwi.

Keterangan Bambang Widjanarko yang menuduh bahwa “kepergian Brigjen Sabur ke Bandung dapat dijelaskan sebagai sikapnya untuk berjaga-jaga menghadapi kemungkinan aksi Untung gagal. Dengan demikian, ia dapat membersihkan diri terhadap pimpinan Angkatan Darat. Baik Dake maupun Bambang Widjanarko yang menuduh Brigjen Sabur pergi ke Bandung agar berjaga-jaga bila aksi Untung akan gagal. Dengan tegas Maulwi mengatakan “semua tidak benar” kata Maulwi. “Yang benar adalah pada tanggal 28 September 1965, Brigjen Sabur pergi ke Bandung karena dia punya agenda Ceramah di Seskoad Bandung dan berkunjung ke Panglima Divisi Siliwangi Jenderal Ibrahim Adjie dia baru kembali ke Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965“. jadi pada tanggal 29 September dan 30

September 1965 tidak ada pertemuan Bung Karno dan Brigjen Sabur, Omar Dani, dan Soepardjo, “kata Maulwi.”¹⁰³

Kesaksian Bambang Widjanarko yang mengungkap keterlibatan Soekarno di balik Gerakan 30 September, menurut Asvi Warman adalah dalam rangka menyongsong pemilu 1971, karena bangkitnya kekuatan nasionalis yang membawa nama besar Soekarno. Artinya Kesaksian tersebut tidak ilmiah, karena untuk mematahkan kekuatan kelompok Nasionalis yang pro Sukarno untuk menghadapi prosesi kepemimpinan 1971.¹⁰⁴

Dalam buku lain Asvi Warman juga berpendapat, interogasi terhadap Bambang Widjanarko dilakukan setelah mantan Presiden Soekarno wafat. Apa maksud dilakukan interogasi, kalau hanya bertujuan mencari kesalahan seseorang yang telah meninggal dunia, tentu ada tujuan politis, antara lain, kaitannya dengan persiapan pemilu 1971.¹⁰⁵ Walaupun berdasarkan keterangan Saelan bahwa Sukarno tidak pernah melakukan pertemuan dengan Brigjen Soepardjo pada Tanggal 29 September 1965. Akan tetapi, oleh Sundhaussen menyebutkan dalam bukunya bahwa Soepardjo bertemu dengan Sukarno, karena meninggalkan pos nya di Kalimantan Utara, apalagi Soepardjo tidak melapor ke MBAD, tentu dia berani tidak melapor ke Markasnya karena Sukarno mengetahui dirinya berada di Jakarta. Barangkali karena itulah, pasca Gerakan Soepardjo berani melaporkan ke Sukarno saat berada di Halim mengenai proses penculikan yang terjadi. Dalam kesimpulannya, Sundhaussen menyatakan bahwa “kata kuncinya yang menentukan bagi Untung memulai bertindak boleh jadi diberikan oleh Sukarno pada tanggal 23 September 1965 atau dalam pertemuan yang kemudian yang hingga kini belum dapat diungkapkan”.¹⁰⁶

¹⁰³ Asvi Warman Adam, dkk. *Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Soekarno*. Jakarta: Buku Kompas. 2014., h. 298.

¹⁰⁴ _____. *Orang-orang di Balik Tragedi 1965*. Yogyakarta: Galang Press. 2009, h. 51.

¹⁰⁵ _____. *Melawan Lupa Menepis Stigma setelah Prahara 1965*. Jakarta: Kompas. 2015, h. 49.

¹⁰⁶ Ulf Sundhaussen., *Op Cit*, h. 364.

Namun, menurut Salim Haji Said, menilai kesaksian Bambang Widjanarkobanyak kebenarannya, karena kesaksian tersebut diberikan setelah Soekarno meninggal dunia. Dan juga ketika Soekarno masih hidup keterangan kesaksian Bambang tidak pernah diberikan atau di umumkan, apalagi mencari-cari kesalahan Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa Gestapu, bahkan sama sekali tidak pernah dipergunakan di pengadilan.¹⁰⁷ Antara pernyataan Asvi dengan Salim Said, penulis lebih sepatutnya dengan pendapat Salim said yang lebih obyektif, sementara pernyataan Asvi cenderung politis.

Hal lain, yang menarik untuk dikaji adalah ketika Nasution mendesak Soeharto agar memeriksa Presiden Soekarno meminta pertanggungjawaban atas kejadian G 30 S, namun sikap Soeharto agak lunak, sehingga hal ini menjadi awal pertentangan Nasution dan Soeharto. Di satu sisi Nasution menginginkan Presiden Soekarno diadili di Mahmilub, sementara Soeharto ingin menyelesaikannya secara politis. Adapun alasan kenapa Presiden Soekarno tidak diadili, pertimbangan Soeharto cukup rasional dan emosional, jika seandainya Presiden Soekarno diadili, maka massa pendukung Soekarno akan bangkit melawan berarti sama saja menciptakan perang saudara antara sesama anak bangsa. Selain itu menurut penulis, tidak etis sekali jika seandainya Soeharto mengadili Presiden Soekarno, karena bagaimanapun juga Presiden Soekarno adalah Bapak pendiri Bangsa yang menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bukan karena Soekarno berpihak pada PKI lantas seorang Bapak Pendiri Bangsa di adili dan dipenjara. Sehingga seluruh perjuangan Soekarno tidak ada artinya lagi di mata Bangsa Indonesia. Sikap Soeharto untuk tidak mengadili Soekarno, menurut penulis merupakan Sikap negarawan sejati.

¹⁰⁷ Salim Haji Said. *Op Cit*, h. 129

C. Pranoto Sang Jenderal Sederhana

Pranoto Reksosamodra, saat kecil memasuki HIS (setingkat SD) Katholik di Bagelen dan kemudian melanjutkan pada MULO (setingkat SLTP) Muhammadiyah di Yogyakarta. Setelah itu Pranoto masuk HIK (sekolah pendidikan guru). Pernah menjadi guru di Pekalongan, setelah jaman Revolusi Pranoto beralih untuk mengikuti pendidikan militer PETA, dilantik sebagai *Shodanco* dan ditempatkan di Wates Yogyakarta. Dalam usia 19 tahun mendapat pangkat *Chudanco* (Kapten).¹⁰⁸

Setelah mendengar terbunuhnya enam Jenderal, di sekitar Halim Soekarno melakukan rapat dengan para pembesar Militer dan beberapa Menteri untuk membahas siapa yang akan menjadi pengganti Jenderal Ahmad Yani yang akan duduk menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Ada beberapa nama yang di usulkan pada saat itu antara lain Jenderal Mursyid, Basuki Rachmad, Pranoto Reksosamodra dan Mayor Jenderal Soeharto. Karena Jenderal Mursyid dianggap suka berkelahi, Basuki Rachmad sering sakit dan Soeharto dianggap Jenderal kepala batu, maka pilihan Sang Presiden jatuh kepada Pranoto Reksosamodra. Soekarno memilih Pranoto untuk menggantikan Jenderal Ahmad Yani, karena beliau dianggap sebagai satu-satunya Jenderal yang bisa bergaul dengan berbagai golongan termasuk dengan kalangan kiri pada saat itu.

Pilihan Presiden Soekarno untuk mengangkat Pranoto menjadi Menpangad menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang telah dibantai oleh kelompok Untung, merupakan pilihan yang tepat. Walaupun beberapa anggapan, Soekarno mengangkat Pranoto agar dapat memberikan peluang bagi perkembangan Komunis di Indonesia, karena hanya Jenderal Pranoto yang paling dekat dengan golongan Komunis pada saat itu. Namun, penulis lebih melihat pengangkatan Pranoto selain ia seorang Jenderal Soekarno, ia Jenderal yang berprestasi, loyal dan memiliki kewibaaan di mata Soekarno dan juga

¹⁰⁸ Salim Haji Said, *Ibid.*, h. 116.

sederhana. Hal ini bisa kita lihat ungkapan Soekarno kepada istrinya Dewi Soekarno pada surat tertanggal 3 Oktober 1965. “Anggota MBAD Pranoto agak lemah, tetapi ia satu-satunya orang yang dapat bergaul dengan golongan kiri dan kanan”.¹⁰⁹ Sikap Presiden Soekarno inilah yang membuat Nasution dan Soeharto menilai bahwa Soekarno telah mendapat pengaruh PKI, karena mengangkat Pranoto yang pernah mendukung PKI.

Menurut beberapa perwira tinggi Angkatan Darat kedekatan Pranoto dengan kaum Komunis kental sekali ini terbukti ketika operasi penumpasan PRRI/Permesta. Saat itu Pranoto yang memberikan persenjataan pemuda rakyat yang notabene Komunis untuk ikut membantu penumpasan PRRI di Sumatera. Sekalipun Pranoto tidak Komunis minimal beliau salah seorang Jenderal yang bersimpati pada PKI mungkin karena PKI sangat berjasa dalam operasi penumpasan PRRI dan membantu dan mensukseskan operasi yang ia pimpin saat itu.

Tuduhan yang ditujukan kepada Pranoto, setelah ditemukan surat yang ditulis oleh Kolonel Latief pasca penculikan. Namun surat tersebut sempat dibaca oleh Nasution. Berdasarkan surat tersebut, Pranoto disingkirkan dari Angkatan Darat. Padahal Presiden sudah berusaha menolong Pranoto dengan menempatkannya sebagai Wakil Gubernur Lemhanas. Tapi dengan tegas Gubernur Lemhanas Wiluyo Puspojudo menolak, jika Presiden melantik Pranoto sebagai wakilnya maka Wiluyo akan mengundurkan diri.¹¹⁰

Pranoto selain Jenderal Soekarno, dalam kalangan militer ia adalah Jenderal yang taat dan setia kepada Sapta Marga, hal ini dibuktikan ketika ia sudah diangkat oleh Presiden Soekarno untuk menggantikan Jenderal Yani, Namun, ia terlanjur mengamini kepemimpinan Soeharto hasil rapat para petinggi Angkatan Darat di MBAD dan dengan sendirinya ia taat kepada Soeharto. Tapi sejarah berkehendak lain, ketaatan dan kesetiaan tersebut di balas dengan

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 119

¹¹⁰ Darmawan, MM, *Soekarno memilih tenggelam agar Soeharto muncul*, (Jakarta: Hikayat Dunia, 2008), h. 170.

kepahitan, empat bulan setelah pengangkatan Soeharto sebagai Kasad yaitu pada tanggal 14 Oktober 1965. Tepat pada tanggal 16 Februari 1965 atas perintah dari Kasad Mayor Jenderal Soeharto, Pranoto pun ditangkap dengan tuduhan terlibat G 30 S.¹¹¹

Pranoto yang dipenjara oleh Rezim Orde Baru selama lima belas tahun, tanpa bukti yang jelas hanya berdasarkan dugaan tentang keterkaitannya dengan para pelaku G 30 S, padahal sudah jelas-jelas ia adalah seorang Nasionalis sejati dan sangat setia terhadap presiden Soekarno. Setelah mengalami hukuman yang panjang Pranoto pun keluar dari tahanan di jemput oleh anaknya Handri, pada tanggal 16 Februari 1981 setelah dilepas secara terhormat oleh Kodam Cawang, ketika ditawarkan oleh Aparat untuk diantar menggunakan mobil, Pranoto menolak, ia lebih memilih berjalan kaki menuju rumahnya di kawasan Kramat Jati. Setelah berada di luar tahanan orang yang pertama menelpon Jenderal Pranoto adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, dalam percakapannya Nasution meminta maaf kepada Pranoto karena selama ini telah salah menilai, bahkan Jenderal Nasution mengingatkan Pranoto agar berhati-hati setelah berada di luar tahanan. Kemudian orang kedua yang menelpon Jenderal Pranoto adalah Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, yang menurut garis silsilah masih merupakan keponaan Jenderal Pranoto, dalam kesempatan itu, Sarwo Edhi mengatakan penyesalannya karena telah di manfaatkan oleh Jenderal Soeharto.¹¹²

D. Pergolakan Daerah dan Dampak G 30 S

Peristiwa G 30 S merupakan malapetaka yang mengerikan bagi keluarga korban G 30 S maupun bangsa Indonesia pada umumnya, karena bagaimanapun peristiwa tersebut merupakan catatan sekaligus lembaran hitam sejarah modern Indonesia. Dimana peristiwa tersebut

¹¹¹ Asvi Warman Adam. *Op. Cit.*, h.44

¹¹² <https://narakata.com/2015/11/06/telepon-nasution-dan-sarwo-edhi-setelah-pranoto-dibebaskan>. di akses tanggal 5 Juli 2016.

telah menghantui seluruh masyarakat Indonesia, sehingga secara Psikologis PKI yang dianggap sebagai dalang utama dalam peristiwa tersebut ibarat Monster ataupun Raksasa yang selalu memangsa para korbannya. Bahkan beberapa puluhan tahun Komunis telah menjadi hantu yang selalu menghantui rakyat Indonesia lebih-lebih non-komunis.

Setelah terjadi Peristiwa G 30 S dan kekejaman oknum yang melakukan pembunuhan terhadap ke enam Jenderal dan satu orang Putri dari Jenderal Nasution di ekspos di Media, akhirnya menimbulkan kemarahan dari sebagian masyarakat Indonesia lebih-lebih yang ada di Jawa dan Sumatera. Dan peristiwa tersebut, memberikan peluang bagi musuh-musuh PKI yang sebagian besar berasal dari kalangan Umat Islam, karena pada awalnya mereka pernah mengalami konflik dan saling bantai ketika saling merebut Tanah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Di Yogyakarta setelah mendengar pengumuman Dewan Revolusi pusat oleh Letkol Untung, muncul reaksi dari Mayor Mulyono untuk membentuk Dewan Revolusi daerah, inisiatif tersebut datang dari Sekretaris I PKI DIY Wiryomartono, atas dasar instruksi Wiryomartono oleh Mayor Mulyono mengeluarkan pengumuman Dewan Revolusi daerah Yogyakarta lewat RRI.¹¹³

Singkatnya setelah menghadiri briefing dengan Pangdam VII di Magelang, beberapa saat sepulang dari Magelang tersebut Kolonel Katamso di datangi oleh dua truk dan satu Jeep dari Yon "L". Pasukan tersebut tanpa tata krama memasuki rumah Kolonel Katamso langsung menodongkan senjata ke arah Katamso, tanpa basa-basi pasukan tersebut langsung menculik Kolonel Katamso dan dibawah ke markas Yon L di Kentungan.

Setelah Katamso, giliran Kolonel Sugiyono yang diculik oleh pasukan Yon L, yang menculik Sugiyono adalah Peltu Sumardi atas perintah Mayor Wisnuaji, kira-kira pukul 02.00 dini hari tanggal 2

¹¹³ Taufik Abdulah, et al, *Malam Bencana*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), h. 116.

Oktober 1965 disebelah selatan markas Yon L, telah disiapkan lubang untuk mengeksekusi kedua kolonel tersebut. Karena dipukuli berkali-kali dengan sebuah kunci mortir kolonel Sugiyono tewas, kemudian Kolonel Katamsa di pukuli lagi dengan kunci mortir oleh Sertu Alip Toyo. Kedua jenazah Kolonel tersebut di masukan ke dalam Lubang sampai ditemukan pada tanggal 12 Oktober, namun jenazah kedua kolonel tersebut selang 18 hari baru di gali. ¹¹⁴

Sementara di wilayah Surakarta sebagai salah satu daerah yang cukup banyak pendukung PKI, mendengar berita Dewan Revolusi pusat Walikota Surakarta Oetomo Ramlan yang juga orang PKI langsung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi wilayah Surakarta. Selain Walikota Surakarta, kepala Daerah yang mendukung PKI adalah Bupati Karanganyar Drs. Harun Al Rasyid, Bupati Boyolali Suadi, Bupati Sragen dan Bupati Wonogiri. ¹¹⁵

Pada tanggal 12 Oktober 1965 di rumah Dargo, dilakukan pertemuan antara D.N Aidit, Pono dan Munir (anggota CC PKI yang datang dari Jawa Timur), dalam pertemuan tersebut disepakati usulan Munir agar PKI menggunakan perjuangan bersenjata untuk mengambil alih kekuasaan. ¹¹⁶



Gambar 12. Orang-orang PKI yang ditangkap di Banyuwangi.

(Sumber:<http://beritakabar.com/30/09/2014/pembantaian-yang-tak-tercatat-2.html>) diakses 9 Juli 2016.

¹¹⁴ Taufik Abdullah, et.al. *Ibid.*, hh. 118-119.

¹¹⁵ Taufik Abdullah, et.al, *Ibid.*, h. 140.

¹¹⁶ Taufik Abdullah, et.al, *Ibid.*, h. 142.

Setelah kedatangan pasukan RPKAD dibawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo banyak orang-orang PKI yang ditahan, dan sehari setelah mayat Kolonel Katamso dan Sugiyono ditemukan, Suryosumpeno selaku Panglima Diponegoro langsung menjadikan status Jawa Tengah dalam keadaan darurat perang sekaligus melarang PKI. Pada tanggal 21 Oktober 1965 SOBSI melakukan pemogokan di pabrik tembakau di Klaten. Dan hari-hari berikutnya, pengikut-pengikut PKI menempatkan rintangan di sepanjang jalan dari Tegalorejo ke Delangu dan beberapa jalan lainnya sekitar Gondangwinangun, Sukaharjo, dan Boyolali. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 1965, PKI mulai melakukan teror dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh golongan nasionalis dan agama baik yang berada di dalam maupun di sekitar kota Surakarta.¹¹⁷

Secara nasional terjadi pelanggaran HAM pasca usaha kudeta pada 30 September 1965 meliputi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Laporan Tim KontraS, sebaran persekusi terhadap korban-korban peristiwa 1965-1966 meliputi hingga 12 provinsi, 1653 bentuk pelanggaran yang terjadi kepada 593 korban (82 persen dialami oleh laki-laki; 15 persen dialami oleh perempuan; dan 3 persen dialami oleh korban yang belum teridentifikasi jenis kelaminnya) seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.¹¹⁸

Tabel. Jumlah korban terdokumentasi menurut Provinsi dan jenis kelamin

No	Daerah/ Propinsi	L	P	Tidak diketahui
1	Sumatera Utara	1	0	0
2	Sumatera Barat	10	2	0
3	Bangka Belitung	2	0	0
4	DKI Jakarta	18	0	0
5	Jawa Barat	12	0	0
6	Jawa Tengah	177	21	10
7	D.I Yogyakarta	3	13	1

¹¹⁷ Taufik Abdullah, et.al, *Ibid.*, h. 145.

¹¹⁸ Haris Azhar, et al. *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965 Sebuah Upaya Pendokumentasian*, (Laporan KontraS dan ICTJ), Jakarta: 2012), h. 19.

8	Jawa Timur	68	11	4
9	Kalimantan Timur	60	4	0
10	Sulawesi Utara	58	29	1
11	Sulawesi Tenggara	52	11	2
12	Sulawesi Selatan	20	1	2
Jumlah		481	92	20
Presentase %		81,1	15,5	3,4

Sumber: Laporan Kontras (20 :2012)

Di Sumatra Barat korban pembasmian berjumlah 25.653 orang. Di Pariaman jumlah korban meninggal 277 orang, jumlah yang ditahan 9.463 orang dan yang hilang 403 orang.¹¹⁹

Walaupun tidak banyak korban yang berarti di Jawa Barat, seorang mahasiswa Parahiyangan Julius Usman meninggal akibat bentrokan. Selain itu luka pilu dan trauma yang mendalam yang dialami oleh keluarga-keluarga korban seperti keluarga D.N Aidit. Kemudian hal yang serupa dialami oleh Rivai Apin yang pernah bergabung dengan Chairil Anwar dan Asrul Sani dalam kumpulan puisi angkatan 45 Rivai di buang ke pulau buru.¹²⁰

Korban di Jawa Barat tidak sebanyak seperti di Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dimana diperkirakan ratusan ribu orang korban akibat pembantaian: 800.000 orang di Jawa Tengah dan Jawa Timur, 100.000 orang lebih di Bali. 10.000 orang di Sulawesi dan Nusa Tenggara (termasuk di timor Barat), 6.000 orang di Aceh, kurang dari 1.000 orang di Kalimantan selatan. Dari jumlah yang tewas itu, di duga orang komunis hanya 20%.¹²¹

Menurut laporan Kontras, bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Blitar antara lain; pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, penculikan, pengusiran secara paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang serta pemenjaraan tanpa proses

¹¹⁹ Taufik Abdullah, et.al, *Op. Cit.*, h.

¹²⁰ Nina H. Lubis, *Sebelum G 30 S Sesudah*, (Jawa Barat: Masyarakat Sejarahwan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2012), hh. 140-143.

¹²¹ *Ibid.*, h. 72.

peradilan, perampasan hak miliki, kerja paksa dan penghilangan hak secara politik.¹²²

Beberapa pimpinan teras PKI secara bertahap ditangkap, diadili, dipenjara, bahkan ada yang ditembak mati di tempat dan jasadnya di hilangkan. Apa yang dilakukan oleh militer merupakan tindakan yang keji dan tidak manusiawi. Namun, apa yang dialami oleh korban pimpinan teras PKI merupakan konsekuensi logis atas tindakan makar yang mereka lakukan dengan cara melawan pemerintah yang sah dan ingin merubah ideologi negara Indonesia dari Ideologi Pancasila menjadi Ideologi Komunisme. Apapun alasannya, yang jelas pemberontakan merupakan sesuatu yang tidak baik.

Menurut pernyataan AM Hendropriyono dalam acara ILC yang diselenggarakan TV One, “bahwa kondisi negara pada saat itu, dalam situasi yang tidak normal, tidak stabil sehingga hukum kehilangan daya rekatnya. Hukum yang berlaku pada saat itu adalah membunuh atau di bunuh”. Sehingga upaya penegakkan hukum sangatlah sulit, banyak anggota masyarakat yang main hakim sendiri.

Persoalan G 30 S tidak berhenti pada titik dimana posisi PKI sebagai yang tertuduh dan penanggungjawab utama atau dalang dibalik semua proses penculikan yang telah terjadi. Namun, pasca keruntuhan Rezim Soeharto atau Orde Baru versi G 30 S mulai dituliskan kembali menurut kesaksian para korban dan pelaku G 30 S. hal ini, menurut penulis tidak menjadi persoalan, karena akan membuka tabir kepalsuan serta subyektifitas para penulis dan sejarahwan. Sehingga generasi berikutnya dapat mempelajari sejarah tidak semata-mata versi yang direkayasa oleh para penguasa ataupun kepentingan golongan tertentu. Namun, dengan adanya berbagai versi tersebut generasi akan semakin kritis dalam memahami sejarah yang di tulis oleh penguasa. lalu pada akhirnya biarlah generasi menyeleksi seperti apa sejarah yang benar, bukan atas pembenaran penguasa atau kebijakan pemerintah. Intinya kehadiran sejarah yang beragam dapat

¹²² Haris Azhar, et al. *Op. Cit.*, h. 25.

memotivasi generasi agar berpikir kritis dan analitis serta mencari tahu lebih dalam kebenaran fakta sejarah yang sebenarnya.

E. Reaksi Mahasiswa Menentang G 30 S

Awal mulanya mahasiswa mengalami polarisasi, ini juga tidak terlepas pengaruh ideologi yang menaunginya pada saat itu. Seperti yang kita ketahui CGMI anak emasnya PKI begitu juga dengan PMII merupakan Underbouw dari organisasi Islam besar yaitu NU, IMM sebagai anak kandung Muhammadiyah, kecuali HMI yang tidak memiliki ibu kandung sebagaimana organisasi mahasiswa lainnya. HMI menjadi organisasi yang independen. Karena HMI dianggap saingan berat CGMI di tingkat Kemahasiswaan, oleh PKI dianggap anti-Revolusioner serta dianggap Kapitalis Birokrat dan antek-CIA. Maka PKI bekerja keras untuk membubarkan HMI.

Setelah berhasil mengeluarkan HMI dari PPMI pada tanggal 21 Oktober 1964, CGMI hendak memaksakan tuntutan pembubaran HMI. Ketika memberikan sambutan, dengan lantang Aidit menuntut pembubaran HMI yang dianggapnya anti-Manipol, Kontra-revolusioner, tidak progresif. *“mengapa Masyumi /GPII telah dibubarkan, HMI tidak di bubarkan?, kalau tidak dapat membubarkan HMI, kata DN Aidit, “lebih baik pakai sarung”.*¹²³

Upaya PKI lewat uonderbouwnya CGMI mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar HMI dibubarkan, menimbulkan kekhawatiran bagi Pimpinan Muhammadiyah pada saat itu. Sehingga dengan segera Muhammadiyah mendirikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai alternatif jika suatu waktu pemerintah membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam.

Terkait isu pembubaran HMI banyak tokoh yang sangat khawatir antara lain, Menteri Pendidikan Syarif Tayeb, ketika diberikan Informasi oleh Soebandrio, langsung saja Syarif Tayeb melaporkan hal tersebut kepada Jenderal Ahmad Yani sebagai Menpangad Yani

¹²³ Sulastomo, *di Balik Tragedi 1965*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Umat, 2009) h. 27.

membenarkan Sikap menteri pendidikan tersebut dengan mengatakan, “semasa engkau berbaju hijau, saya akan berikan dukungan kata, Yani”. Ketika menerima PB HMI Menpangad Ahmad Yani berkata, “terus terang, saya sebagai Menpangad, tentu saya terus menerus memperhatikan situasi HMI. Ya, kalau hari ini HMI dan SOKSI dirongrong dan diganyang oleh PKI, maka adalah tidak mustahil besok atau lusa akan merongrong Angkatan Darat”.¹²⁴ Prediksi Ahmad Yani ternyata benar, walaupun PKI tidak sukses membubarkan HMI, namun, Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawannya dibawa arus badai Revolusi yang sangat kejam sehingga menenggelamkan mereka dari pentas perpolitikan Indonesia. Revolusi dibayar sangat mahal dengan nyawa 8 Jenderal sebagai taruhannya.

PKI sebagai salah satu partai yang mendapatkan simpati dari Presiden Soekarno, yang selalu menteror lawan-lawan politiknya dengan mengatakan tidak Revolusioner dan merupakan antek-antek asing. Setelah PKI sukses mempengaruhi Presiden Soekarno untuk membubarkan partai Masyumi dan PSI, kini giliran ormas Islam HMI kemudian selanjutnya giliran menuduh Muhammadiyah sebagai sarang Masyumi. Melihat sikap PKI semacam itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang pada saat itu diketua oleh K.H Ahmad Badawi menggunakan startegi lampu hijau dalam mendekati pemerintah (Soekarno).¹²⁵

Sekalipun Aidit dengan berbagai cara mengusulkan pembubaran HMI, Namun tidak membuat Presiden Soekarno dengan segera membubarkan HMI, apalagi dengan cara di dikte dan cara-cara lain. Hal ini bisa dilihat dengan adanya keputusan KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi) tertanggal 15 September 1965, No. Tr/1953/Kotrar/65, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa HMI tidak dibubarkan dan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan organisasi mahasiswa yang lainnya.

¹²⁴ *Ibid.*, h. 30-31.

¹²⁵ M. Munawar Kholil, Skripsi. *Sikap Muhammadiyah terhadap PKI, periode Yunus Anis dan Ahmad Badawi 1960-1966*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 7.

Selain hal itu, yang sangat berjasa menolak pembubaran HMI adalah tidak lepas dari peran serta Saifudin Zuhri yang menjabat Menteri Agama pada saat itu, yang meminta kepada Presiden Soekarno agar tidak membubarkan HMI, jika Presiden Soekarno membubarkan HMI, maka dengan tegas beliau meminta mundur dari jabatannya selaku Menteri Agama.

Setelah dibentuk KAP-Gestapu dibawah pimpinan Subchan, reaksi-reaksi Masyarakat semakin mengamuk dengan mengutuk kekejaman PKI. Kini giliran Mahasiswa dalam menuntut pembubaran PKI pada saat itu dikenal “Parlemen Jalanan”. Klimaks dari Demonstrasi terjadi pada tanggal 10 Januari 1966 dimana setelah mengadakan seminar di Fakultas Ekonomi UI, kelompok Kesatuan Aksi mengadakan demonstrasi di Istana dengan tiga tuntutan yaitu, Pembubaran PKI, Pembersihan aparaturnegara dari unsur-unsur PKI dan perbaikan ekonomi.¹²⁶ tiga tuntutan mahasiswa tersebut yang kita kenal sekarang sebagai “TRITURA” atau tiga tuntutan rakyat. 1) Bubarkan PKI, 2) Retoling Kabinet, 3) turunkan harga.

Adanya reaksi mahasiswa terhadap pemerintah pada saat itu, disebabkan kondisi sosial politik yang tidak menentu, kebijakan Presiden Soekarno yang ragu dan enggan membubarkan PKI membuat mahasiswa semakin geram, diperparah lagi Ekonomi semakin ambruk, lengkaplah sudah penderitaan masyarakat Indonesia pada saat itu.

Dikalangan organisasi Kemahasiswaan mengalami dualisme organisasi dan terjadi kemandulan gerakan, hal tersebut disebabkan antara organisasi Ekstra Kampus, Perhimpunan Perserikatan Mahasiswa Indonesia (PPMI) dan Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI) yang merupakan gabungan Dewan-Dewan Mahasiswa intra Kampus dan kedua organisasi ini di dominasi oleh kelompok mahasiswa kiri. Ada tiga organisasi yang tergabung dalam PPMI yang dipecah dalam keanggotaan yaitu, CGMI, GERMINDO dan PERHIMI

¹²⁶ Abdul Syukur. *Kehancuran Ideologis Komunisme*. Jakarta: Jurnal Sejarah Lontar. Vol.5 No. 2 Juli – Desember 2008, h. 6

alasanya ketiga organisasi tersebut adalah terlibat langsung dalam Gerakan 30 September 1965 yang di dalangi PKI.

Setelah dibubarkannya PPMI pada tanggal 23 Desember 1965, beberapa tokoh Mahasiswa pun memfokuskan diri untuk membentuk organisasi baru yang dikenal dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tokoh mahasiswa yang terkenal dengan pembentukan KAMI ini adalah salah satunya Cosmas Batubara (PMKRI) dan Zamroni (PMII). Pada dasarnya kemunculan KAMI adalah karena adanya pengkhianatan PKI yang melakukan kudeta berdarah dengan Gerakan 30 September 1965. Kami berjuang melawan kebobrokan moral di bidang politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.¹²⁷ Karena pada saat itu kondisi ekonomi Indonesia sangat merosot, ditandai dengan kenaikan harga bensin dari Rp 250,- menjadi Rp. 1000,- kemudian tarif Bus dari Rp. 200 menjadi Rp. 1000. Kondisi tersebut sangat membuat menderita rakyat miskin pada saat itu. Sehingga terjadi inflasi mencapai 650%. Di lain pihak Pemerintah sedang mengerjakan proyek-proyek besar yang sebagian anggarannya dibantu oleh Rusia dan China.

Para tokoh gerakan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam kesatuan-kesatuan aksi tersebut, Seperti Rahmat Witolear, Wimar Witolear dan Adi Sasono (berasal dari ITB), Sugeng Sarjadi (Universitas Padjajaran), dan Cosmas Batubara (Universitas Indonesia), serta Mari'e Muhammad (Himpunan Mahasiswa Islam), Liem Bien Koen (PMKRI), Zamroni (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), dan David Napitupulu (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia); serta para senior mereka seperti Subchan ZE, Lukman Harun dan Harry Tjan Silalahi semua tokoh diatas yang menuntut apa yang dinamakan sebagai TRITURA dan sukses membubarkan Kabinet 100 Menteri.¹²⁸ untuk pertama kalinya Mahasiswa Kristen dan Mahasiswa Islam bekerjasama dalam menumpas PKI, bahkan ketika HMI ingin di bubarkan oleh Presiden Soekarno atas desakan

¹²⁷ Nazwir Abu Nain. *Op Cit.*, h. 75

¹²⁸ Sri Bintang Pamungkas, *Setelah Hari "H"*, (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2003), h. 11.

CGMI yang di payungi oleh PKI, PMII dan PMKRI yang menolak atas dibubarkannya HMI.

Gerakan demi gerakan tidak membuat Presiden Soekarno langsung mengamini begitu saja tuntutan mahasiswa pada saat itu. Meski begitu tiga bulan kemudian Soekarno pun melaksanakan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Muncul perlawanan balik dari para pendukung Soekarno. beberapa kelompok kiri mulai menggalang kekuatan seperti Banteng Jakarta (Baja) dan Pemuda Marhaen ingin melakukan serangan balasan ke Markas KAMI yang bertempat di Universitas Indonesia jalan Salemba, akibat dari isu ini, beberapa aktivis gerakan merasa khawatir dan jarang pulang ke rumah banyak yang menginap di kampus, bahkan sebagian dari tokoh gerakan di lengkapi dengan senjata semacam pistol, yang belakangan hari ternyata Pistol tersebut tidak berfungsi hanya sebagai simbol agar aktifis gerakan tidak takut jika pergi kemana-mana.

Hari Sabtu tanggal 15 Januari 1966 sidang Paripurna Kabinet yang dihadiri oleh beberapa perwakilan mahasiswa juga, dalam pertemuan itu Bung Karno dengan nada sangat marah menyinggung dan menuduh mahasiswa tidak tahu adat. Kemarahan Presiden Soekarno bukan tanpa alasan, karena Rumah Hartini istri Bung Karno di coret-corek dengan tulisan-tulisan yang kotor seperti, "SARANG SPILIS, LONTE AGUNG ISTANA, LONTE GERWANI AGUNG, dan lain-lain.¹²⁹

Menindaklanjuti tuntutan Mahasiswa pada saat itu, Soekarno mengadakan *Reshuffle* atau membubarkan kabinet Dwikora lama dan menggantikannya dengan Kabinet Dwikora yang diperbaharui atau disempurnakan. Sehingga kedudukan Jenderal Nasution sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dicopot dan digantikan oleh Letnan Jenderal Sarbini. Kemudian Soeharto ditetapkan sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan Kepala Staf Komando Tertinggi. Sementara kedua tokoh yang masih dicurigai terlibat

¹²⁹ Soe Hok Gie. *Catatan Seorang Demonstran*. (Jakarta: LP3S. 2016.), h. 150.

dan mendukung Gerakan 30 September tetap di pertahankan oleh Presiden Soekarno.¹³⁰

Tertembaknya Arief Rahman Hakim pada tanggal 24 Februari 1966 tidak membuat kalangan mahasiswa mundur dalam melawan segala bentuk kekejaman tirani kekuasaan pada saat itu, sehari setelah gugurnya Arief Rahman Hakim datang kontingen Mahasiswa Bandung untuk memberikan dukungan gerakan pada Mahasiswa Jakarta. Perlawanan mahasiswa pun semakin kuat.

Kematian Arief Rahman Hakim yang diduga ditembak oleh Pasukan Cakrabirawa ini, sampai sekarang muncul menjadi Sejarah yang Kontroversi, karena menurut beberapa saksi yang tertembak bukan Arief Rahman Hakim, cara tersebut adalah skenario Militer agar memanaskan suasana massa pada saat itu, sehingga perlawanan di kalangan mahasiswa semakin sengit. Namun, semuanya perlu dicari bukti yang autentik. Bahkan tuduhan bahwa Arief Rahman Hakim ditembak oleh Pasukan Cakrabirawa dibantah oleh Maulwi Saelan menurutnya pada saat itu tidak ditemukan satu pun senjata dari anggota-anggota yang bertugas yang mengeluarkan tembakan. Laras senjata semuanya bersih.¹³¹ Bahkan menurutnya setelah ia dipindahkan kembali ke Puspom ABRI, ia mendapatkan keterangan dan penjelasan dari beberapa anggota POM DAM V bahwa demonstrasi mahasiswa pada 1966 di Lapangan Banteng, yang mengakibatkan tertembaknya mahasiswa bernama Arief Rahman Hakim, yang melakukannya adalah seorang anggota POM DAM V Jaya, yang pada saat itu bertugas di Garnisun Ibu Kota.¹³²

Setelah KAMI dibubarkan aksi perlawanan tetap dilanjutkan dengan mendirikan Resimen Arief Rahman Hakim yang di pimpin oleh Fahmi Idris yang belakangan menjadi menteri Perindustrian setelah munculnya Orde Baru. Dalam perjalanannya Resimen

¹³⁰ Radis Bastian. *Rekam Peristiwa Politik paling Menegangkan. Sejak Rezim Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Hingga SBY*. Yogyakarta: Palapa. 2016, h. 88

¹³¹ Asvi Warman Adam, dkk. *Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Soekarno*. (Jakarta: Buku Kompas. 2014.), h.

¹³² Asvi Warman Adam, dkk. *Ibid.*, h. 340.

Arief Rahman Hakim mengganti nama menjadi Laskar Arief Rahman Hakim, karena Kolonel Sarwo Edhie tidak suka mahasiswa menggunakan istilah yang berbau ABRI.

Setelah kematian Arief Rahman Hakim awal kemunculan keterlibatan RPKAD untuk melatih Mahasiswa pada saat itu, hal itu juga kenapa nama gerakan tersebut dinamakan Resimen Arief Rahman Hakim, yang tidak lama mengganti nama menjadi Laskar Arief Rahman Hakim atas permintaan Kolonel Sarwo Edhie. Laskar Arief Rahman Hakim bergerak terus menduduki aset-aset negara yang dikuasai kaum komunis: dari kantor pemerintah sampai gedung kedutaan Cina dan kantor berita *Xinhua*. “Tapi kami tidak menjarah atau merampok,” kata Fahmi.¹³³



Gambar 13. Aksi Pemuda Muslim menuntut pembubaran PKI

F. Supersemar yang Dipertentangkan

Pada tanggal 11 Maret 1966, ketika sedang memimpin sidang kabinet, tiba-tiba saja Presiden Soekarno meninggalkan Istana tanpa memakai alas kaki, dengan di ikuti oleh Soebandrio dan Chaerul Saleh. Sikap Presiden Soekarno tersebut, setelah mendapat Nota dari ajudannya Bambang Widjanarko bahwa di luar Istana ada beberapa pasukan

¹³³ Seri Buku Tempo. *Sarwo Edhie dan Misteri 1965*. Jakarta: KPG. 2015., h. 60.

liar. Anehnya pada saat sidang Kabinet tersebut Menteri Panglima Angkatan Darat tidak dapat hadir karena alasan sakit. Menpangad pun mengutus beberapa Jenderal antara lain Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf dan Brigjen Amir Machmud agar pergi ke Bogor dalam rangka menyampaikan pesan bahwa bila Paduka Yang Mulia Presiden memberikan kepercayaan kepada Mayjen Soeharto selaku Menpangad dan Pangkopkamtib dapat mengatasi keadaan untuk tercapainya ketenangan dan kestabilan negara.



Gambar 14. Presiden Soeharto, Jenderal Yusuf dan Jenderal Amir Mahmud dalam acara khusus sekitar Supersemar.

Setelah Musyawarah yang agak cukup lama, Presiden pun bertindak mengeluarkan surat Perintah Sebelas Maret 1966 memberikan wewenang kepada Mayjen Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk menjalankan tugas serta untuk menjamin keamanan dan ketertiban Negara yang saat itu sedang mengalami kekacauan. Juga menjamin keselamatan pribadi dan keluarga sang Presiden.¹³⁴ dengan tidak sadar atau memang Presiden

¹³⁴ Nazwir Abu Nain. *Op Cit.*, h. 104.

Soekarno dalam kondisi di tekan mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret dengan sendirinya menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto.

Ada dua point penting isi Supersemar yaitu, 1) memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto agar mengendalikan sesuatu keadaan agar tertib kembali, 2) agar Jenderal Soeharto melindungi Presiden dan keluarga serta ajaran Presiden. Dengan di masukannya point kedua tersebut sebenarnya Soekarno telah menunjukkan kelemahan dan ketakutannya terhadap perlawanan massa aksi dan sebenarnya Soekarno sudah merasa diri lemah dan para pemujanya sedikit demi sedikit merubah haluan dan bahkan melawan balik kebijakan-kebijakan yang diterapkan olehnya.

Sampai sekarang, Surat Perintah Sebelas Maret ini masih mengalami kontroversi. Surat sakti yang melegitimasi Soeharto secara de facto sebagai Penguasa baru yang ikut mengendalikan sistem pada saat itu yang sedang bobrok. Lewat Supersemar juga Soeharto membantai golongan yang dianggap berhianat kepada Pancasila. Tanpa segan dan ragu setelah mendapat legitimasi Supersemar Soeharto membubarkan PKI. Menteri-menteri yang dianggap terlibat dan memiliki kaitan dengan PKI ditahan oleh Soeharto termasuk Soebandrio dan Pranoto.

Belakangan muncul beberapa pernyataan dan kesaksian orang-orang yang mengaku mengetahui peristiwa sakral tersebut, bahwa yang hadir pada saat itu adalah Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M. Yusuf, Brigjen Amir Mahmud dan Maraden Panggabean, bahkan menurut pernyataan Soekardjo Wilardjito yang menjadi anggota Cakrabirawa, mengaku saat itu Panggabean menodongkan pistolnya kepada presiden Soekarno, dengan kata lain penugasan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa.¹³⁵

Namun hal tersebut di bantah oleh Jenderal M. Yusuf pada Jum'at pagi 4 september 1998. Menurutnya bahwa yang hadir menemui

¹³⁵ Asvi Warman Adam. *Op Cit.*, h. 116.

Presiden Soekarno tanggal 11 Maret 1966 hanya tiga orang Jenderal, dan mereka disana hanya sampai pukul 20.30".¹³⁶

Ada beberapa point penting yang menjadikan Supersemar kontroversi yang berkembang saat ini diantaranya yaitu, 1) keberadaan teks asli Supersemar tidak pernah diketahui sampai sekarang, 2) identitas tokoh yang mengetik Naskah Supersemar belum diketahui secara pasti, walaupun Ali Ebram mengaku bahwa ia yang mengetiknya, namun menurut Nazwir Abu Nain mengatakan, bahwa surat tersebut diketik oleh Soebandrio setelah dibaca oleh Presiden Soekarno, ia pun menandatangani. 3) kemudian kontroversi mengenai kertas yang digunakan. Sejarahwan asing yaitu Ben Anderson mengatakan bahwa Supersemar diketik dengan bingkai Markas Besar Angkatan Darat, hal itu pula menjadi alasan mengapa Supersemar yang asli hilang atau sengaja dihilangkan.¹³⁷

Ketika Soekarno menyerahkan Supersemar dan diperkuat oleh TAP MPRS, Soeharto mulai menyalahgunakan dan menganggap *transfer of Authority* dengan tegas dalam pidato nya Soekarno mengatakan, bahwa Supersemar bukanlah *Pengalihan Kekuasaan* namun merupakan perintah pengamanan kewibawaan Presiden sekaligus perintah pengamanan keluarga dan ajaran Presiden. Setelah Nawaksara di tolak oleh MPRS, Soekarno murni di telanjangi secara paksa dan perlahan-lahan menempati kurungan rumah atau tahanan rumah dan secara perlahan-lahan menunggu mati dalam ruangan yang sempit. Suatu nasib yang sangat tragis bagi seorang penguasa yang begitu di segani oleh dunia. Dan dicintai oleh rakyatnya.

Mengetahui hal tersebut Soekarno justru tidak memberikan perlawanan yang berarti atas tindakan Soeharto yang merongrong kewibawaan Presiden atau memang Presiden Soekarno tidak ingin bertengkar/berkelahi dengan Soeharto, mungkin alasannya Presiden Soekarno tidak ingin ada pertumpahan darah antara sesama anak bangsa. Padahal jika Presiden Soekarno mau mengadu antara

¹³⁶ Ibid., h. 117.

¹³⁷ Radis Bastian. *Op Cit.*, h. 106.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dkk. 2012. *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Abu Nain. Nazwir 2012. *Angkatan 66 Dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Cipro Media
- Achmad. Imam dan Dirgantara Wicaksono. 2013. *Marxisme dan Kehancuran PKI*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adam, Asvi Warman. 2006. *Soeharto File*, Yogyakarta: Ombak
- Adam. Asvi Warman, dkk. 2014. *Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Soekarno*. Jakarta: Buku Kompas.
- Adam. Asvi Warman. 2009. *Orang-orang di Balik Tragedi 1965*. Yogyakarta: Galang Press.
- Adam. Asvi Warman. 2015. *Melawan Lupa Menepis Stigma setelah Prahara 1965*. Jakarta: Kompas.
- Anderson. David Charles. 2008. *Kudeta Madiun 1948*, Yogyakarta: MedPress.
- Azhar, Haris. et al. 2012. *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965 Sebuah Upaya Pendokumentasian*, Laporan Kontras dan ICTJ, Jakarta.
- Bakri A.G Tianlean,. A.H. Nasution, *Bisikan nurani Seorang Jenderal: Kumpulan wawancara dengan media massa*. Jakarta: Mizan.
- Bastian. Radis. *Rekam Peristiwa Politik paling Menegangkan. Sejak Rezim Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dus, Megawati, Hingga SBY*. Yogyakarta: Palapa. 2016.
- Darmawan. MM. 2008. *Sukarno memilih tenggelam agar Suharto Muncul*, Bandung: Hikayat Dunia.

- Djarot. Eros, dkk. 2006. *Siapa sebenarnya soeharto*. Jakarta: Mediakita.
- Christopher Roberts, Ahmad Habir & Leonard Sebastian. 2015. *Indonesia's Ascent; Power, Leadership and The Regional Order*. PALGRAVE MACMILLAN: New York.
- Fauzan. Firos 2009. *Pelurusan Sejarah Tragedi Nasional 1 Oktober 1965 Penghianatan Biro Khusus PKI*. Jakarta: Firos Fauzan.
- Fic. Victor M. 2006. *Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Studi Tentang Konspirasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- G. Moedjanto. 2003. *Dari pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Ghofur, Abdul. Skripsi, *Peran Soeharto dalam Peristiwa G 30 S/PKI*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Gie. Soe Hok. 2005. *Orang-orang di Persimpangan kiri jalan*. Yogyakarta: Bentang Ilmu.
- Gie. Soe Hok. 2016. *Catatan Seorang Demonstran*. Jakarta: LP3S.
- Hadiwijoyo, Suwelo. 2013. *Ajaran-ajaran Spektakuler bung Karno dan Pak Harto*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hanang, Dimas Anom. Skripsi 2014 *Dampak Pemberontakan PKI Jawa Tengah pada Tahun 1965*, Yogyakarta: Universitas PGRI.
- Hasan, S. Hamid. 2012. *Pendidikan Sejarah Indonesia Isu dalam Ide dan Pembelajaran*. Bandung: Rizqi Press.
- Hatta, Mohammad. 2011. *Bukittinggi-Rotterdam lewat Betawi, Untuk Negeriku sebuah otobiografi*, Jakarta: Buku Kompas.
- Ismail. Taufik. 2005. *Katastrofi Mendunia Marxisma Leninisma Stalinisma Maosima Narkoba*. Jakarta: Yayasan Titik Infinitum.
- Kasenda, Peter. 2013. *Hari-hari terakhir Sukarno*. Depok: Komunitas Bambu
- Kasenda. Peter. 2014. *Bung Karno Panglima Revolusi*, Yogyakarta: Galang Pustaka.

- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lubis, Nina H. 2012. *Sebelum G 30 S Sesudah*, Jawa Barat: Masyarakat Sejarahwan Indonesia Cabang Jawa Barat.
- Ma'arif, Syafi'i. Et.al. 2010 *Menggugat Sejarah*, Bandung: Segarsy.
- Madjid, M. Dien dan Johan Wahyudhi. 2014. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Matanasi, Petrik. 2011. *Untung, Cakrabirawa dan G 30 S*, Yogyakarta: Trompet.
- Moeljanto. D.S. dan Taufik Ismail. 1995. *Prahara Budaya kilas balik Ofensif Lekra/PKI dkk*. Bandung: Mizan.
- Munawar Kholil, M. Skripsi. 2009. *Sikap Muhammadiyah terhadap PKI, periode Yunus Anis dan Ahmad Badawi 1960-1966*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Pambudi. A. 2011. *Fakta dan Rekayasa G 30 S menurut Kesaksian Para Pelaku*, Yogyakarta: MedPress.
- Pamungkas, Sri Bintang. 2003. *Setelah Hari "H"*, Jakarta: Pustaka Utan Kayu.
- Pusat Sejarah TNI, 2012 *Sejarah Penumpasan Pemberontakan PRRI/PERMESTA*, Jakarta: Pusat Sejarah TNI.
- Rearson Sean. 2002. *Peristiwa 65/66 dan pembunuhan massal PKI*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Riana. I Ketut. 2007. *Misteri Angka di Balik Kegagalan Pemberontakan G 30 S/PKI Prespektif Budaya*. Jakarta: Pusat Analisis dan Pengkajian Transformasi sosial.
- Ricklefs, M.C. 1999. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: GajahMada University Press.
- Ricklefs. M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi,
- Said. Salim Haji. 2015. *Gestapu 65, PKI, Aidit, Soekarno dan Soeharto*. Bandung: Mizan.

- Santosa, Kholid O.. 2009. *Perjalanan Sang Jenderal Besar Soeharto 1921 – 2008*, Bandung: Segi Arsy.
- Scott, Peter Dale. 2008, *Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno 1965-1966*. Jakarta: Prespektif Media Humanika.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Seri Buku Tempo. 2015. *Sarwo Edhie dan Misteri 1965*. Jakarta: KPG.
- Simatupang. Iwan. 2013 *Tragedi G-30-S dalam Bayang-bayang Bung Karno Sang Peragu: kesaksian Kebudayaan atas prolog-Epilognya*, editor Th. Bambang Murtianto. Jakarta: Insan Merdeka.
- Sulasman. 2014. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sulastomo. 2009. *DiBalik Tragedi 1965*, Jakarta: Yayasan Pustaka Umat.
- Sutrisno, Slamet. 2006. *Kontroversi dan Rekonstruksi Sejarah*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3S
- Syamsuddin. 2005. *Mengapa G 30 S/PKI Gagal ?*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syukur, Abdul. *Kehancuran Ideologis Komunisme*. Jakarta: Jurnal Sejarah Lontar. Vol.5 No. 2 Juli – Desember 2008.
- TAP Nomor. XV/MPRS/1966 *Tentang Penunjukkan Wakil Presiden dan Tata cara pengangkatan Pejabat Presiden*
- TAP Nomor IX/MPRS/1966 *Tentang Surat Perintah Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Panglima Besar Revolusi, Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara*.
- TAP Nomor XXV/MPRS/1966 *Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh*

Wilayah Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan setiap kegiatan Untuk Menyebarkan atau mengembangkan faham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Toto, Iman K. Rahardjo & Herdianto WK. 2001. *Bung Karno Gerakan Massa dan Mahasiswa Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, Jakarta: Grasindo.

Wanandi. Yusuf. 2014. *Menyibak Tabir Orde Baru. Memoar politik Indonesia 1965- 1998*, Jakarta: Buku Kompas.

Wardana, Wage. Makalah, *Tinjauan dan Telaah Kurikulum 2013*, disampaikan oleh Wage Wardana pada Kuliah Pascasarjana Prodi Pendidikan Sejarah. 2015.

Wardaya, SJ, Baskara T. 2008. *Bung Karno Menggugat, Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal 65' hingga G 30 S*. Yogyakarta: Galang Press.

Wiranthaprawira, Ciynta. 2005. *Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965*. Heidelberg: Lembaga Persahabatan Jerman-Indonesia.

Sumber lain dari Koran/Majalah/Internet

Ardian Muhammad, *IPT Nyatakan Indonesia bersalah lakukan pembantaian massal 1965*, <http://bitly/2a85NPT>. Merdeka.Com (di akses tanggal 22 Juli 2016

<http://arsipindonesia.com/bincang/prof-dr-anhar-gonggong-kita-amnesia-sejarah-pancasila-masih-sebatas-slogan/> di akses tanggal 7 Juli 2016.

<http://www.bangsaonline.com/berita/15802/nursyahbani-tak-takut-mati-bela-pki-sejarawan-anhar-gonggong-mengecam.> di akses tanggal 5 Juli 2016

<https://narakata.com/2015/11/06/telepon-nasution-dan-sarwo-edhi-setelah-pranoto-dibebaskan.> di akses tanggal 5 Juli 2016

Koran dan Majalah

Imron Cotan, *Permintaan Maaf*. Kompas, Kamis, 26 Mei 2016

Iwan Gardono Sujatmiko, *Revolusi, Kudeta, Rekonsiliasi*, (Kompas, Rabu 27 Juli 2016

- Kompas, *Pancasila Ideologi Paling Sesuai*, (Edisi, 13 November 2015)
- M. Subhan, SD. *Kudeta*, Kompas, edisi Kamis 21 Juli 2016
- Ryamizard Riyacudu, *Ancaman dan Strategis harus sinkron*, Tempo, edisi 11 Juli 2016
- Suara Islam. *Gerakan Bela Negara: Tidak ada tempat bagi komunisme di NKRI*. Edisi 207 tanggal 16-30 Oktober 2015
- Suara Islam. *Pemberontakan PKI Meletus di Madiun, di Mulai dari Kekacauan di Surakarta*. Edisi. 207 Tanggal 16-30 Oktober 2015
- Tempo, *Rahasia-rahasia Ali Moertopo*, (Edisi Khusus, Tanggal 14-20 Oktober 2013)
- Tempo. *Jejak CIA pada Tragedi 1965*, (edisi Khusus 50 Tahun G-30-S. Tanggal 5-11 Oktober 2015)
- Ragna Boden. *The 'Gestapu' events of 1965 in Indonesia New evidence from Russian and German archives*. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI) 163-4 (2007)
- Jaechun Kim. *U.S. Covert Action in Indonesia in the 1960s: Assessing the Motives and Consequences*. JOURNAL OF INTERNATIONAL AND AREA STUDIES Volume 9, Number 2, 2002
- Hongxuan Lin and Matthew Galway. "Heirs to What Had Been Accomplished": D. N. Aidit, the PKI, and Maoism, 1950–1965., *Modern Intellectual History* (2022), 1–29.
- Dhani, R., Lee, T., & Fitch, K. (2015). *Political public relations in Indonesia: A history of propaganda and democracy*. *Asia Pacific Public Relations Journal*, 16(1)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PANGLIMA ANGKATAN DARAT, LETJEN TNI A. YANI
MENOLAK NASAKOMISASI TNI ANGKATAN DARAT/
ABRI DAN GAGASAN PEMBENTUKAN
ANGKATAN KE V *)**

Dibalik keagungan Bung Karno PKI lah yang berkudung, lulang macan. PKI mengepit kepala harimau. Pidato Bung Karno dipotong-potong dan dipergunakan demi kepentingan propaganda PKI. Ide-ide Bung Karno dimanipulasi untuk *machtvorming* PKI, merembes menginfiltrasi secara intensif ke segala bidang dan lapangan kehidupan bangsa Indonesia, dengan senjata Nasakomisasi.

TNI/ABRI menolak realisasi Nasakomisasi dalam tubuhnya. Yang diterima TNI/ABRI adalah “Nasakom jiwaku”. Bukan Nasakomisasi. Bukan sebagai ideologi.

Pak yani menolak realisasi Nasakomisasi dalam tubuh TNI-AD. Disamping itu paling tidak disetujui adalah kampanye PKI: “*satu tangan pegang bedil satu tangan pegang pacul*” yang tujuannya membentuk angkatan ke V yang dikuasai PKI.

Jumlah sukarelawan dwikora yang terdaftar pada waktu itu mencapai 21 juta. Sebagian besar di antara mereka sudah mengalami latihan kemiliteran. Mereka inilah dijadikan sasaran prapoganda PKI agar menjadi pengikut. Untuk dijadikan angkatan ke V dengan intinya Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, SOBSI Ormas PKI. Tujuannya adalah untuk mengimbangi TNI/ABRI dan selanjutnya dijadikan alat untuk merebut kekuasaan.

Pak Yani menyadari bahaya yang tersembunyi dibalik gagasan angkatan ke-V PKI itu. Pak Yani dengan tegas dan terang-terangan menolak gagasan untuk membentuk angkatan ke V di samping angkatan laut-Udara-Darat dan Polisi, karena akan membahayakan keselamatan negara. Akan mengancam keselamatan Pancasila.

Angkatan ke V adalah gagasan Perdana Menteri RRC Chou En Lai ketika Dr. Soebandrio mengunjungi Peking bulan Januari 1965. Chou En Lai berjanji akan membantu 100.000 pucuk senjata. Akan dimasukkan ke Indonesia tanpa setahu departemen Pertahanan dan Keamanan. Tanpa melalui prosedur Hankam. Namun kemudian dipergoki oleh Pak Panjaitan, senjata-senjata itu diselundupkan bersama-sama bahan-bahan bangunan Ganefo, Senapan Chung.

Menanggapi usul DN Aidit agar buruh dan tani serta nelayan dipersenjatai dalam rangka membentuk Angkatan ke V, Pak Yani Men Pangad menyatakan sebagai berikut:

“Ya pertanyaan apakah mengenai buruh dan tani dipersenjatai, TNI setuju atau tidak. Saya sudah lama sebetulnya mencari kesempatan untuk bisa mencetuskan isi hati TNI, dan pandangan terhadap soal ini. Waktu di Surabaya kesempatan timbul, ditanya kepada saya pendapat mengenai buruh dan tani kalau dipersenjatai, Bapak setuju apa tidak. Interpretasi buruh dan tani itu apa, saya katakan soal dipersenjatai buruh dan tani itu soal lama, lihat saja Hansip, OKD, OPR, apakah itu bukan buruh dan tani. Saya termasuk orang yang setuju dan Angkatan Bersenjata otomatis setuju. Kalau yang saudara maksud buruh dan tani itu termasuk BTI dan SOBSI, saya tidak setuju”.

**) dikutip dari: “Ahmad Yani sebuah kenang-kenangan”, oleh: Ibu Yani, 1981.*

**PIDATO PRESIDEN SOEKARNO DI HADAPAN KESATUAN
AKSI MAHASISWA INDONESIA PADA TANGGAL
12 DESEMBER 1965**

“.....Saya tahu, bahwa kamu itu adalah onderbouw dari sesuatu partai. Karena partai-partai itu main gontok-gontokan, maka kamu ikut gontok-gontokan...”

“...Seribu dewa dari kayangan tak dapat mematikan Nas, mematikan A dan mematikan Kom...”

“...Peruncingannya itu yang harus kita hantam.

Gestoknya yang harus kita hantam, tapi Kom-nya tak bisa dihantam”

KRITIK OTO KRITIK (September 1966)

Sudisman menyusun Kritik Oto Kritik (KOK) tentang kesalahan-kesalahan PKI selama 15 tahun sejak tahun 1951. KOK dimuat dan disebarluaskan dalam penerbitan khusus “MIMBAR RAKYAT” ke 9 tahun 1966 untuk membangkitkan dan memelihara semangat anggota-anggotanya, yang intinya sebagai berikut:

1. Supaya anggota-anggota PKI memiliki kesadaran revolusioner dan berani berjuang jangka panjang untuk membangun partai kembali.
2. Memperteguh pendirian komunis bagi setiap anggota PKI.
3. Menanamkan pengertian bahwa untuk bergerilya yang terpenting adalah bersandar pada penduduk desa yang miskin.
4. Meng-ekpose politik kanan, kekuasaan militer kanan NASUTION-SOEHARTO.
5. Tetap bersemangat komunis dalam menghadapi kesulitan, dan teguh melawan reaksi.
6. Menanamkan pengertian tentang perjuangan bersenjata, yaitu perjuangan buruh dan tani bersenjata dengan tujuan pokok, perubahan politik.

ISI DOKUMEN PALSU GILCHRIST

(Mei 1965)

I discussed with the American Ambassador the questions set out in your No.:67786/65. The Ambassador agreed in principal with our position but asked for time to investigate certain aspect of the matter.

To my question on the possible influence of bunker's visit, to jakarta, The Ambassador state that he saw no chance of improving the situation, and that there was therefore no reason for changing our joint plans. On the contrary, the visit of the US. President's personal envoy would give us more time to prepare the operation the utmost detail. The Ambassador felt that further measure were necessary to bring our efforts into closer alignment. In this connection, he said that it would be useful to impress again on our local army friends that extreme care discipline and coordination of action were essential for the succes of the enterprise.

I promised to take all necessary measures. I will report my own views personally in due course.

GILCHRIST

(TERJEMAHAN BEBAS)

(Saya telah membicarakan dengan duta besar Amerika untuk menanyakan hal yang saudara tanyakan dalam No.:67786/65. Duta Besar pada pokoknya sepakat dengan pendirian kita, tetapi meminta waktu untuk meneliti segi-segi khusus tentang hal itu.

Atas pertanyaan tentang kemungkinan pengaruh dari kunjungan Bunker, ke Jakarta, Duta Besar menyatakan bahwa ia tidak melihat kemungkinan untuk memperbaiki keadaan, dan dengan demikian tidak ada alasan untuk merubah rencana bersama kita. Sebaliknya, kunjungan utusan pribadi Presiden AS akan memberi kita waktu yang lebih banyak untuk menyusun operasi itu dengan rincian sekecil-kecilnya. Duta besar berpendapat bahwa diperlukan tindakan-tindakan lanjutan untuk lebih mendekatkan jajaran kita. Dalam hubungan ini, ia mengatakan bahwa para "local army friends" kita perlu diberi kesan lagi bahwa disiplin yang ketat dan koordinasi yang erat dalam tindakan akan berarti penting bagi keberhasilan usaha ini.

ISU-ISU “DEWAN JENDERAL” OLEH PKI

Audit menganggap Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi). Dewan jenderal yang mengatur / melakukan kegiatan politik untuk memusuhi PKI”. Dewan jenderal” beranggotakan perwira-perwira tinggi yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan Pemimpin Besar Revolusi (PBR). “Dewan Jenderal” beranggotakan pati-pati yang tidak loyal kepada PBR dan menilai kebijaksanaan PBR. “Dewan Jenderal” bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan imperialis. “Dewan Jenderal” akan mengadakan coup merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno dengan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan HUT ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965.

Susunan “Kabinet Dewan Jenderal” yang di isukan PKI antara lain.

Perdana Menteri	: Jenderal A.H. Nasution
Wakil PM/ Menhan	: Letjen A. Yani
Mendagri	: Hadisubono
Menlu	: Roeslan Abdulgani
Menhubperdaglu	: Brigjen Sukendro
Men/Jaksa Agung	: Mayjen S. Parman
Menag	: K.H Rusli
Men/ Pangad	: Mayjen Ibrahim Adjie
Men/Pangal	: ?
Men/Pangal	: Komodor Rusmin Nuryadin
Men/ Pangak	: Mayjen Pol Yasin (Susunan Waluyo' alix Ado, dkk)

SUSUNAN ORGANISASI GERAKAN 30 SEPTEMBER / PKI *)

Pimpinan Tertinggi: DN. AIDIT

Sebagai Pimpinan Tertinggi DN. Aidit mengarahkan bidang politik dan organisasi

Pimpinan Pelaksana: SYAM

Sebagai pelaksana gerakan Syam yang mengurus, menyusun, mengatur dan memimpin pelaksanaan instruksi DN. AIDIT.

Pimpinan Militer:

- LETKOL UNTUNG
- KOL. INF A. LATIEF
- MAYOR UD.SUYONO
- BRIGJEN SUPARDJO

Mereka ditugaskan untuk memimpin gerakan militer, mengorganisasi pasukan dalam kesatuan-kesatuan tempur, teritorial dan cadangan. Penunjukan mereka berdasarkan pertimbangan:

1. Letkol Untung. Dan Yon I Cakrabirawa, setidak-tidaknya dengan istana dan termasuk orang yang taat kepada PKI.
2. Kolonel A. Latief, komandan Brigifi/KODAM V JAYA, setidaknya mempunyai pengaruh dan berpengalaman menggerakkan pasukannya. Iapun termasuk yang taat pada PKI.
3. Mayor Ud. Suyono, dan Men PPP AU tentu mempunyai pengaruh dalam resimennya di samping taat serta patuh terhadap PKI.
4. Brigjen Supardjo, setidak-tidaknya telah banyak memiliki pengalaman dan patuh kepada PKI

Pimpinan Politik: SYAM DAN PONO

Syam dan wakilnya Pono melaksanakan tugas politik dan pimpinan tertinggi gerakan, yaitu menyampaikan garis-garis politik Ketua CC PKI DN. AIDIT kepada bidang militer dan informasi /Observasi

Informasi/Observasi: WALUYO

Waluyo memimpin pengumpulan informasi/data mengenai keadaan politik dan militer di Jakarta untuk disampaikan kepada Syam

Dewan Revolusi:

Komposisi Dewan Revolusi dibuat untuk mencerminkan seolah-olah tidak ada pendominasi oleh orang komunis dan memberi tempat yang luas kepada golongan lain yang non komunis. Yang penting bahwa yang akan bertindak sebagai penasehat bagi pimpinan Dewan Revolusi ialah Syam Cs, yakni akan melaksanakan setiap keputusan Ketua CC PKI DN. Aidit. Dewan Revolusi berfungsi pemerintahan baru dibentuk, maka akan selesailah tugas Dewan Revolusi itu.

Dewan Militer:

Selain untuk menyusun Dewan Revolusi, Biro Khusus PKI juga mempunyai tugas membentuk Dewan Militer seperti yang diperintahkan DN Aidit pada tanggal 27-28 September 1965. Dewan ini hanya terdiri atas Syam dan beberapa perwira yang mempunyai kedudukan (yang tinggi) atau perwira-perwira yang dianggap berpengaruh. Rapat Dewan Militer ini pertama kali diadakan pada tanggal 30 september 1965 (malam) di rumah Syam. Perwira-perwira yang disebut menjadi anggota Dewan Militer ialah Mayjen Pranoto, Mayjen Rukman. Kolonel Sidik, SH dan Mayor Udara Suyono. Fungsi Dewan Militer ialah memberi nasihat kepada ketua CC PKI, khususnya dalam rangka G.30. S.?PKI. catatan: Mayjen Rukman tidak hadir, karena ia telah kembali ke Ujung Pandang sejak tanggal 29 September

Anggota,

1. Politbiro CC PKI: MH, Lukman
2. Menteri Negara Diperbantukan Pada Presidium Kabinet Dwikora: Nyoto
3. Komandan Pasukan: Mayor Udara Gatot Sukrisno
4. Komandan Pasukan: LETTU INF. DUL ARIEF
5. Komandan Pasukan: KAPTEN INF. SURADI
6. Biro Khusus di Daerah-Daerah:
 - DKI
 - Jawa Barat
 - Jawa Tengah
 - Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Jawa Timur
 - Sumatera Utara
 - Sumatera Barat
 - Riau
 - Bali
 - Nusa Tenggara Timur
 - Kalimantan Selatan
 - Endro sulistyono
 - Harjana
 - Salim
 - Wiryomartono
 - Rustomo
 - Muhammad nazir
 - Baharuddin hanafi
 - Sutjipto
 - Wihaji
 - Th.p.rissi
 - Amar hanafiah

**PERTEMUAN SYAM, PONO DAN WALUYO
DI RUMAH SYAM-JAKARTA
(14 AGUSTUS 1965)**

Hasil pertemuan:

- Bahwa gerakan yang akan datang ini harus terbatas dan merupakan gerakan militer
- Bahwa sasaran utama dalam gerakan ini ialah Jenderal yang tergabung dalam apa yang dinamakan Dewan Jenderal.
- Bahwa dalam rangka gerakan ini perlu penguasaan atas Instalasi-instalasi vital seperti Telekom, RRI, PTT dan kereta Api.
- Bahwa dalam susunan rencana gerakan, didapatkan 3 orang calon pimpinannya, Yakni Letkol Untung dari Resimen Cakrabirawa, Kolonel Inf. A. Latief Komandan Brigif I KODAM V/ JAYA dan Mayor Udara Suyono dan P3AU.
- Bahwa organisasi gerakan dibagi dalam 3 bagian, ialah, militer, politik dan informasi/observasi
- Bahwa perlu memanggil semua Kepala Biro Khusus Daerah untuk menerima instruksi-instruksi langsung dari Syam untuk memeriksa persiapan pasukan barisan yang akan dipergunakan dalam gerakan di daerah masing-masing.

Selanjutnya, berdasarkan instruksi Ketua CC PKI DN. Aidit kepada Pimpinan Pelaksana Gerakan, maka berturut-turut sejak tanggal, 4,6,9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 29 September 1965 diadakan rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan persiapan pelaksanaan gerakan di tingkat pusat, maupun dengan para Kepala Biro Khusus Daerah.

**INSTRUKSI SYAM KEPADA SEMUA KEPALA BIRO
KHUSUS PKI DAERAH (SEPTEMBER 1965)**

1. Supaya di daerah masing-masing dibentuk grup-grup komando sebagai pimpinan daerah dan grup-grup komando ini harus di kepalai oleh Biro Khusus PKI Daerah setempat.
2. Supaya dipersiapkan tenaga-tenaga untuk menjadi anggota Dewan Revolusi Daerah
3. Untuk gerakan di daerah supaya dibentuk kekuatan militer yang terdiri dari ABRI
4. Gerakan di daerah supaya dapat menguasai jawatan-jawatan/ instansi vital daerah.
5. Untuk dapat mengetahui dimulainya gerakan supaya selalu mengikuti siaran RRI Pusat Jakarta.
6. Bahwa instruksi ini sifatnya rahasia dan hanya didiskusikan dalam lingkungan Biro Khusus PKI Daerah setempat.

DEMOKRASI KEBUN BINATANG

(*Taufik Ismail*)

Mari kita pergi ke kebun binatang bersama-sama, karena kita ingin mendengar gagasan pimpinan baru kota para hewan itu,

Pimpinan baru kebun binatang ingin mereposisi sebuah kandang, dan kandang itu kandang yang penting posisinya,

Kandang itu berpagar kawat yang cantik ornamennya, tinggi oleh siapa pun tak terlompati, kekar oleh siapapun tak tergoyahkan, luasnya sepuluh hektare, di dalamnya ada danau, gua, padang rumput dan belukar,

Penduduk kandang itu kambing, kancil, kelinci, kijang, kucing, kuda, kerbau, keledai, anjing, domba, sapi, gajah, rusa, monyet, percutut, burung hantu, dan jerapah,

Pak kepala kebun binatang berminat benar memasukan serigala ke dalam kandang besar itu, karena katanya, sudah 34 tahun lamanya makhluk ini berada di luar sana,

Alasannya adalah bahwa demokrasi hewan harus ditegakkan, termasuk demokrasi serigala. Menurut serigala, ukuran demokrasi adalah “sama-sama hewan”, dan gagasan ini dengan gigih didukung kepala kebun binatang,

Ke- 17 hewan lainnya itu tak setuju. Menurut mereka, definisi demokrasi adalah “sama-sama hewan yang tidak memakan satu sama lainnya, tidak memangsa satu sama lain”. Pak kepala ganjilnya tak menerima logika ini dan tetap berpihak kepada definisi demokrasi serigala,

Keesokkan harinya, selepas acara makan pagi penghuni kebun binatang, dia membawa seekor hewan berkaki empat ke kandang itu. “Kalian tengoklah makhluk penyabar ini. Perhatikan bulunya yang bersih berkilat, telinganya yang lemas terkulai dan bahasa badanya yang sopan. Nah, ‘kan dia jinak dan baik hati, “kata kepala,

Ke- 17 hewan itu berteriak. “Lho, itu ‘kan serigala, yang memakai jaket kulit kambing dan memakai telinga kambing palsu” seru mereka. “biar menyamar seperti apa, pak kepala, kami tetap kenal betul bau keringat badannya”

Dua puluh empat jam kemudian, kepala kebun binatang datang ke depan pintu kandang, menuntun lagi mahluk itu. «saya minta kalian dengan hati terbuka memperhatikan ciptaan Tuhan ini. Perhatikan tingkah lakunya yang mandiri, matanya yang bening dan suci, ekspresi luhur budi pekertinya. Nah, bukankah dia jinak dan baik hati” tanyanya.

Ke- 17 hewan penghuni kandang bersorak. “yaaah, itu kan serigala menyamar lagi, yang memakai rompi bulu domba, dan memakai tanduk domba palsu” seru mereka. “biar menyamar seperti apa, pak kepala, biar bulunya wol putih seperti domba Ostrali, kami tetap kenal gigi dan taringnya yang runcing-runcing itu.”

Kepala kebun binatang tampak kesal, gerahannya gemelutuk dan wajahnya mulai memerah. “Bagaimana ini kalian, kok tidak menghormati demokrasi serigala?. Hargailah hak asasi hewan, artinya jangan mengucilkan hewan apapun, “katanya.

Ke- 17 hewan penghuni kandang berebutan bicara.

“bagi kami, hak asasi hewan adalah tidak mempertakuti hewan yang lain, serigala itu dulu 42 tahun yang lalu, juga 34 tahun yang lalu, bukan saja mempertakuti, tapi memakan daging penghuni kandang yang lain. Buas sekali dia ini. Bekas ceceran darah mangsanya masih melekat di pagar kandang. Pak kepala, kok seperti tidak belajar biologi. Dulu 34 tahun silam, dimana Pak Kepala?”.

Pak kepala kebun binatang tidak pernah menjawab pertanyaan ini,

Pelan-pelan dia lesu berjalan, pulang ke kantor kebun binatang. Serigala itu menitipkan rompi bulu domba dan tanduk palsu dombanya pada kepala kebun. Lalu dia melarikan diri, kedalam belukar bersembunyi, barangkali kepala kebun binatang membuang kedua titipan itu. Siapa yang lihat?

2000

KONFLIK SEGITIGA KEKUASAAN

(Persaingan Sukarno, Angkatan Darat dan PKI
yang melahirkan Prahara 1965)

Peristiwa G 30 S 1965 adalah salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah Indonesia, yang telah mempengaruhi dinamika politik, sosial, dan budaya bangsa ini selama beberapa dekade. Meski sudah lebih dari setengah abad berlalu, peristiwa ini masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan, baik dalam diskusi akademis maupun di tengah masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang benar-benar berada di balik peristiwa tersebut, motif yang melatarbelakangi, serta dampak jangka panjangnya, terus menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Buku ini hadir untuk mengajak pembaca menggali lebih dalam berbagai sudut pandang dan fakta terkait G 30 S, dengan tujuan membangun kesadaran sejarah yang lebih utuh dan mendalam.

Buku ini menggali secara mendalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G 30 S), salah satu babak paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Dimulai dengan menelusuri latar belakang kebangkitan komunisme dan kondisi politik pada tahun 1960-an, buku ini menjelaskan bagaimana ketegangan politik akhirnya meledak menjadi tragedi pada malam 30 September 1965. Kronologi peristiwa ini diuraikan dengan detail, memberikan konteks yang kuat terhadap dinamika politik dan militer saat itu.

Selanjutnya, buku ini mengupas berbagai teori tentang siapa sebenarnya di balik G 30 S. Dari anggapan bahwa PKI adalah dalangnya, hingga teori konflik internal Angkatan Darat, serta dugaan keterlibatan asing seperti CIA. Buku ini tidak hanya berhenti pada analisis fakta, tetapi juga menyajikan profil dan kesaksian para pelaku serta saksi mata, memberikan sudut pandang yang lebih personal terhadap peristiwa ini.

Penutup buku ini merenungkan pentingnya rekonsiliasi dan kesadaran sejarah, serta mempertanyakan apakah pemerintah perlu meminta maaf kepada para korban tragedi tersebut. Melalui pendekatan yang menyeluruh, buku ini mengajak pembaca untuk memahami G 30 S sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa yang harus dipahami secara kritis dan mendalam.

litnus. Penerbit



literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara_
085755971589

Pendataan

+17

